



# RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2022

**DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN  
PERMUKIMAN**

**KABUPATEN PASAMAN BARAT  
TAHUN 2021**



**PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT**  
**DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**

Jl. Mahoni Komplek Partanian – Sukomananti  
Simpang Empat – Pasaman Barat

---

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**  
**KABUPATEN PASAMAN BARAT**  
Nomor : 800/ /DPKP/2021

Tentang

**RENCANA KERJA**  
**DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**  
**KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2022**

**KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**  
**KABUPATEN PASAMAN BARAT**

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 104 Ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah. Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2022;
- b. Bahwa Rencana Kerja (Renja) OPD memuat program dan kegiatan yang mendukung visi, misi, tujuan, strategi, dan kebijakan pemerintah daerah dan disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi OPD serta berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan renstra OPD;
- c. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana yang dimaksud pada huruf a dan b maka Rencana Kerja (Renja) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasaman Barat tahun 2022, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang System Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 – 2025;
4. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
8. Peraturan presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2007 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah, Serta Tata Cara Perubahan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022;
13. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025;
14. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 20 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 07 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2005-2025;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 18 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2011-2031;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 14 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2016-2021;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 21 Tahun 2016 tentang penetapan Organisasi Perangkat Daerah;
19. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 32 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022;

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU

: Rencana Kerja (Renja) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2022 adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yakni Tahun Anggaran 2022.

KEDUA

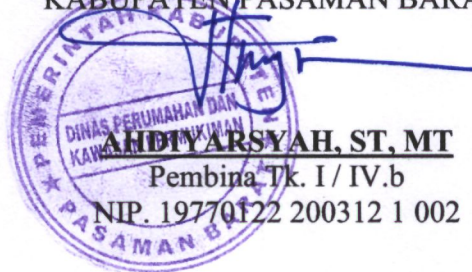
: Rencana Kerja (Renja) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat kesatu menjadi pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman pada Tahun Anggaran 2021.

KETIGA : Keputusan Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasaman Barat ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Padang Tujuh

Pada Tanggal : Agustus 2021

KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN  
PERMUKIMAN  
KABUPATEN PASAMAN BARAT,



**ANDI ARSYAH, ST, MT**

Pembina Tk. I / IV.b

NIP. 19770122 200312 1 002

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pembangunan merupakan proses dan upaya untuk melakukan perubahan kearah yang lebih baik dari kondisi saat ini. Agar pembangunan yang dilaksanakan mencapai hasil yang telah ditetapkan diperlukan suatu perencanaan pembangunan yang matang dan terpadu yang mencakup semua aspek yang terkait dengan perencanaan itu sendiri. Perencanaan pembangunan daerah memainkan peranan yang sangat penting dalam memetakan potensi yang ada secara optimal tanpa mengabaikan kelestarian alam dan lingkungan, sehingga strategi yang dirumuskan melalui implementasi system perencanaan dapat dilakukan secara komprehensif dan sistematis.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, komprehensif, dan responsif sesuai dengan jenjang perencanaan, yakni perencanaan jangka panjang, jangka menengah maupun tahunan. Selain itu, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 juga mewajibkan setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) OPD dengan berpedoman kepada Rencana Strategis (Renstra) OPD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Rencana Kerja (Renja) OPD merupakan dokumen perencanaan tahunan yang bersifat operasional sekaligus merupakan pedoman kerja untuk menterjemahkan dan mengimplementasikan perencanaan strategis lima tahunan sebagaimana tertuang dalam Renstra OPD.

Rencana Kerja (Renja) mempunyai kedudukan yang strategis dalam menjembatani perencanaan pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan RPJMD Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2021-2026 dan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2021-2026 dan menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Kepala

Daerah dan OPD dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai tugas pokok dan fungsinya. Renja OPD juga memberikan jaminan terhadap keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta menjadi salah satu instrument evaluasi pelaksanaan program/kegiatan OPD untuk mengetahui capaian kinerja .

Renja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2022 berisikan dokumen perencanaan yang memuat kebijakan, program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan untuk periode 1 (satu) tahun kedepan yang bersifat teknis operasional. Rencana Kerja (Renja) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2022 memuat evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2020 dan tahun berjalan, program dan kegiatan, indikator kinerja dan kelompok sasaran serta sumber dana yang dibutuhkan untuk tahun 2022. Sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mendukung kebijakan pemerintah Kabupaten Pasaman Barat dibidang perumahan dan kawasan permukiman, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman mempunyai tugas antara lain perumusan kebijakan teknis bidang perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan.

Renja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman disusun secara partisipatif dan demokratis yang dihasilkan melalui proses pemikiran strategis dalam memenuhi kebutuhan dan menyikapi isu yang berkembang untuk kemudian diimplementasikan dalam program dan kegiatan OPD. Tahapan selanjutnya Rencana Kerja (Renja) digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) OPD dalam rangka penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2022.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman juga disusun secara terpadu dengan memperhitungkan standar pelayanan minimal, Jenis Pelayanan Dasar SPM bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman terdapat dua jenis pelayanan yaitu :

1. Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana.

2. Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah kabupaten.

Kualitas dokumen Rencana Kerja (Renja) sangat ditentukan oleh kualitas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan serta kemampuan OPD dalam menyusun, mengorganisasikan, mengimplementasikan, mengendalikan serta mengevaluasi rencana yang telah disusun.

## **1.2 Landasan Hukum**

Rencana Kerja (Renja) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasaman Barat disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
2. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2014-2019;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 29 Tahun 2019 tentang Standar Pelayanan Minimal Perumahan
6. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005 – 2025;

7. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010 – 2030;
8. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 07 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2005-2025;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2011 – 2031;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 21 Tahun 2016 tentang Penetapan Organisasi Perangkat Daerah;
12. Peraturan Daerah Pasaman Barat Nomor 7 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2005-2025;
13. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 32 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021;
14. Surat Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor : 188.45/340/Bup.Pasbar tentang Kawasan Kumuh

## **1.2 Maksud dan Tujuan**

Rencana Kerja ( Renja ) OPD Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasaman Barat ini disusun dengan maksud untuk menyediakan dokumen perencanaan 1 (satu) tahunan yang berisikan program dan kegiatan yang terukur sebagai dasar penilaian kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta sebagai perangkat untuk menciptakan perencanaan pembangunan yang terintegrasi pada tahun 2021.

Adapun tujuan penyusunan Rencana Kerja (Renja) ini antara lain sebagai berikut :



1. Sebagai pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan dalam rangka mencapai sasaran pembangunan yang telah ditetapkan selama periode 1 (satu) tahun.
2. Mengoptimalkan fungsi perencanaan pembangunan daerah dalam bidang perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan.
3. Sebagai upaya mewujudkan perencanaan pembangunan yang akuntabel, responsif, partisipatif, efektif, efisien dan berkelanjutan.
4. Menyediakan informasi dan gambaran pelaksanaan fungsi serta sebagai tolok ukur kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasaman Barat.
5. Untuk meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat sebagai upaya untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan daerah.

#### **1.4 Sistematika Penulisan**

Mengingat arti strategis Rencana Kerja (Renja) OPD dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka sejak awal penyusunan hingga penetapan dokumen Rencana Kerja (Renja) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2021 mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, memuat ketentuan antara lain:

1. Memuat program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai dengan indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi OPD.
2. Berpedoman pada Renstra OPD dengan tujuan menjamin kesesuaian program, kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran serta prakiraan maju yang disusun dalam rancangan awal Rencana Kerja (Renja).
3. Berpedoman pada hasil evaluasi Renja perangkat daerah tahun lalu dan hasil evaluasi Rencana Kerja (Renja) tahun berjalan, bertujuan untuk memastikan bahwa

rumusan kegiatan alternative dan/atau kegiatan baru yang disusun pada rancangan awal Renja adalah dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran Renstra.

4. Program dan kegiatan yang tercantum dalam Rencana Kerja (Renja) harus sesuai dengan program prioritas sebagaimana tercantum dalam Misi RPJMD serta disusun selaras dengan program dan kegiatan yang telah disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam forum Musrenbang.
5. Renja setidaknya memuat pendahuluan, hasil evaluasi Rencana Kerja (Renja) tahun lalu, tujuan, sasaran, rencana kerja dan pendanaan dan penutup.
6. Dokumen Renja akan menjadi bahan penyempurnaan rancangan awal RKPD dan menjadi rancangan RKPD pemerintah daerah.

Adapun sistematika penulisan Rencana Kerja (Renja) OPD dapat diuraikan sebagai berikut :

## **BAB I : PENDAHULUAN**

- I.1 **Latar Belakang;** memuat gambaran umum penyusunan rancangan Renja OPD, pengertian ringkas tentang Renja OPD, proses penyusunan Renja OPD, keterkaitan antara Renja OPD dengan dokumen RKPD, Renstra OPD, dengan Renja K/L dan Renja provinsi serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.
- I.2 **Landasan Hukum;** memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan OPD serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran OPD.
- I.3 **Maksud dan Tujuan;** memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja OPD.
- I.4 **Sistematika Penulisan;** menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja OPD serta susunan garis besar isi dokumen.

## **BAB II : HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU**

- 2.1 **Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD,** Memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun sebelumnya, capaian Renstra OPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja OPD tahun-tahun sebelumnya.
- 2.2 **Analisis Kinerja Pelayanan OPD,** memuat kajian terhadap capaian kinerja pelayanan OPD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007.

- 2.3 **Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD**, memuat sejauh mana tingkat kinerja pelayanan OPD dan hal kritis yang terkait; permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi OPD, dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, dan terhadap capaian program nasional/internasional, seperti SPM dan MDGs (*Millenium Developmnet Goals*); tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan OPD dan formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan strategis.
- 2.4 **Review terhadap Rancangan Awal RKPD**, berisikan uraian mengenai proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan; Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan; dan penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut.
- 2.5 **Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat** menguraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari masyarakat, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun berdasarkan pelaksanaan musrenbang.

### **BAB III : TUJUAN DAN SASARAN OPD**

- 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional, memuat penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan tugas pokok dan fungsi OPD.
- 3.2 **Tujuan dan sasaran Renja OPD**, didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra OPD.
- 3.3 **Program dan Kegiatan**, memuat faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, total kebutuhan dana/pagu indikatif, dan penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD.

### **BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Memuat uraian tentang rencana kerja dan pendanaan masing-masing program/kegiatan yang mendukung tupoksi OPD dan prioritas pembangunan Pemerintah Daerah.

### **BAB V : PENUTUP**

Memuat catatan penting yang perlu mendapat perhatian baik dalam pelaksanaan maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

## **BAB II**

### **EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN 2020**

#### **2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Pasaman Barat Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman**

Evaluasi terhadap pelaksanaan Renja OPD bertujuan untuk menilai apakah program-program pembangunan telah dilaksanakan sesuai dengan target kinerja OPD yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) OPD. Melalui evaluasi akan diketahui permasalahan atau kendala-kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja, dan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam merumuskan rencana kerja program pada tahun anggaran berikutnya berdasarkan tolok ukur yang telah ditetapkan.

Pada tahun 2020, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasaman Barat melaksanakan 8 (delapan) program dengan 13 (Tiga belas) kegiatan. Sedangkan pada tahun 2021 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman melaksanakan 7 (Tujuh) program yang didukung dengan 14 (Empat belas) kegiatan.

Evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman tahun 2020 memuat pencapaian target kinerja tahun 2020 berdasarkan rencana kerja sebagaimana telah disusun. Sedangkan, evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman tahun 2021 memuat perkiraan capaian kinerja pada tahun berjalan, yang kemudian dikaitkan dengan pencapaian target Dinas Perumahan Kawasan Permukiman pada tahun sebelumnya serta tahun yang akan datang.

Adapun informasi yang akan didapatkan melalui evaluasi pelaksanaan Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagai berikut :

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi/melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
3. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;

4. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra OPD; dan
5. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan dan realisasi capaian kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman tahun 2020 serta perkiraan capaian kinerja tahun berjalan (TA 2021) sebagaimana tabel 2.1.1 berikut ini :

Tabel 2.1.1  
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja OPD dan  
Pencapaian Renstra OPD s.d. Tahun 2020  
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasaman Barat

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan(Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) th 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d. Tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2019			Target Program dan Kegiatan (Renja OPD Tahun 2020)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s.d. Tahun 2020		Cat
					Target Renja SKPD Tahun 2019	Realisasi Renja SKPD Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8 (7/6)	9	10 (5+7+9)	11 (10/4)	12
1	Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah	Persentase rumah tangga bersanitasi layak	100 %	56 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	
2	Program Pengembangan Perumahan	Persentase ketersediaan rumah layak huni	99,26 %	96,72 %	97,99 %	100 %	100 %	98,62 %	100 %	100 %	

3	Program Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	Jumlah sertifikat tanah milik pemerintah daerah	50 Persil	--	30 Persil	47 Persil	156,67 %	15 Persil	15 Persil	100%	
4	Program Peningkatan Infrastruktur Pemukiman dan Perumahan	Jumlah tersedianya sarana prasarana jalan lingkungan	25	34,62 KM	37,8 KM	37,8 KM	100 %	25KM	97,42 KM	89,68%	
		Pengurangan luas kawasan kumuh	175	--	20 Ha	15 Ha	75%	20 Ha	15 Ha	75%	
		Penambahan panjang drainase yg dibangun	3001 M	9.428 M	6.082 M	6.082 M	100 %	2.500 M	18.010 M	60,03%	

Tabel 2.1.2.

**Evaluasi Realisasi Kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman  
Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2020**

INDIKATOR KINERJA			Target	Realisasi Target	% Capaian Target (Realisasi Fisik)
<b>I</b>	<b>Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah</b>				
	1	Persentase Rumah Tangga Bersanitasi layak	64,55 %	64,55 %	100
<b>II</b>	<b>Program Pengembangan Perumahan</b>				
		Persentase Ketersediaan Rumah Layak Huni	97,36 %	97.36 %	100
<b>III</b>	<b>Program Peningkatan Infrastruktur Perumahan dan Kawasan Permukiman</b>				
	8	Jumlah tersedianya sarana Prasarana Jalan Lingkungan.	100%	100%	100
	9	Luas Kawasan Permukiman Kumuh	175	--	--
	10	Panjang pembangunan drainase dan gorong-gorong.	6.082	6.082	100
<b>IV</b>	<b>Program Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah</b>				
	13	Persentase konflik pertanahan difasilitasi /diselesaikan.	100 %--	61 %	61 %

Berdasarkan Tabel 2.1.1. dan 2.1.2. dapat dijelaskan bahwa pada tahun 2020, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasaman Barat melaksanakan 5 program teknis dan 3 program rutin dengan jumlah kegiatan yang dilaksanakan sebanyak 13 kegiatan. Program/kegiatan yang dilaksanakan tersebut mendukung



pencapaian 3 sasaran yang dijabarkan kedalam 10 (sepuluh) indikator sesuai Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2022-2026, yaitu :

Tabel 2.1.3

Penilaian Capaian Kinerja Dinas Perumahan dan  
Kawasan Permukiman Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2020

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Rasio Capaian	Predikat
1	Jumlah terbangunnya jalan lingkungan yang baik	129	122	94,57 %	Sangat Baik
2	Jumlah pembangunan sarana dan prasarana air limbah	13	13	100 %	Sangat Baik
3	Jumlah pembangunan dan rehabilitasi drainase lingkungan	24	24	100 %	Sangat Baik
4	Jumlah pembangunan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi masyarakat kurang mampu	156	156	100 %	Sangat Baik
5	Penurunan luasan kawasan kumuh	13	13	100 %	Sangat Baik
6	Jumlah penerbitan sertifikat tanah pemerintah daerah	30	47	156,67 %	Sangat Baik
7	Jumlah penyelesaian konflik pertanahan pemerintah daerah	0	0	--	Kurang

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa 10 (sepuluh) indikator kinerja sasaran dalam beberapa klasifikasi dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Terlaksanan dengan prediket “sangat baik” sebanyak 6 indikator
- Prediket “kurang” sebanyak 1 indikator. Hal ini disebabkan adanya tumpang tindih pelaksanaan kegiatan konflik pertanahan dan lokasi kegiatan fisik yang tidak mendukung pengurangan luas kawasan kumuh.

## 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD

Tugas Pokok dan Fungsi serta Uraian Tugas Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasaman Barat berdasarkan pada Peraturan Bupati No 98 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perumahan dan kawasan permukiman yang meliputi :

1. Membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan kewenangan di bidang perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan, yang meliputi perumusan kebijakan teknis di bidang perumahan, penataan kawasan permukiman dan pertanahan;
2. Memberikan dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang urusan perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan;
3. Melakukan pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan;
4. Mengevaluasi pelaksanaan pembangunan daerah di bidang perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan;
5. Melaksanakan tugas dan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pada perubahan RPJMD Tahun 2016-2021 Dinas Perumahan Kabupaten Pasaman Barat mendukung pencapaian sasaran Kepala Daerah pada misi IV dan V. Berdasarkan hal tersebut diatas telah ditetapkan 1 (satu) tujuan strategis pembangunan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2016-2021 sebagaimana tabel berikut :

**Tabel 2.2.1**

**Tujuan Pembangunan yang mengacu pada Misi Bupati Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2021-2026**

			Tujuan Dinas
--	--	--	--------------

Misi	Tujuan Misi	Sasaran Misi	Perumahan dan Kawasan Permukiman
Menanggulangi kemiskinan melalui penyediaan kebutuhan dasar, pemberdayaan masyarakat dan pengembangan ekonomi kreatif	Menurunkan angka kemiskinan	Terpenuhinya kebutuhan perumahan layak bagi masyarakat	Mewujudkan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman layak.
Mewujudkan pembangunan wilayah yang berkeadilan serta mengelola sumberdaya alam dan penataan ruang secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.	Meningkatnya pemerataan pembangunan infrastruktur	Tersedianya infrastruktur dasar daerah	

Uraian tugas pokok dan fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2021-2026. Pengukuran pencapaian target kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2020 dan proyeksi pencapaian pada tahun 2021 sebagaimana diuraikan pada tabel 2.2.2

**Tabel 2.2.2**

**Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasaman Barat**

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra DPKP				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	
1	Persentase rumah tangga bersanitasi			64,55	72,39	82	100	56	64,55	72,39	82	
2	Persentase rumah layak huni			97,36	97,99	98,62	99,26	96,72	97,36	97,99	98,62	
3	Panjang jalan lingkungan kondisi baik			37,8	25	22,5	25	34,62	37,8	25	22,5	
4	Panjang drainase/gorong-gorong kondisi baik'			6.082	2.500	2.500	3.001	9,428	6.082	2500	2500	
5	Pengurangan luas kawasan kumuh			175	165	155	145	--	--	165	155	
6	Jumlah tanah Pemda yang disertifikatkan			17	30	40	50	--	17	30	40	
7	Jumlah konflik pertanahan											

	yang difasilitasi/ diselesaikan			--	--	4	5	--	--	--	4	
8	Peningkatan Nilai SAKIP			B	B	B	B	C	B	B	B	
9	Level Maturitas SPIP			2	2	3	3	2	2	3	3	
10	Opini Terhadap Laporan Keuangan			WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	

### **2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD**

Dalam penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsinya, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasaman Barat dihadapkan pada sejumlah isu-isu penting yang berimplikasi terhadap penyelenggaraan perencanaan pembangunan daerah. Adapun isu-isu penting yang perlu mendapat perhatian adalah:

- 1) Akses prasarana sarana utilitas (PSU) permukiman seiring dengan pengembangan kawasan permukiman
- 2) Belum tercapainya capaian program pemerintah (Universal access) 100-0-100 yaitu 100 % akses air bersih, 0 % kawasan kumuh dan 100 % akses sanitasi
- 3) Perubahan/Pergeseran pola tata ruang membutuhkan peningkatan sarana dan prasarana untuk mengimbangi rencana pengembangan infrastruktur permukiman.
- 4) Penyediaan kebutuhan tanah makam seiring pertumbuhan kawasan perumahan di daerah;
- 5) Dukungan dan kerjasama pemerintah daerah dengan BPN dalam percepatan sertifikasi tanah Pemerintah Daerah.
- 6) Akses terhadap sarana air limbah setempat yang memadai masih rendah jika dilihat dari penggunaan tangki septic standart yang prosentasenya masih kecil,
- 7) Terbatasnya penyelenggaraan pengembangan sistem pengelolaan air limbah permukiman yang berbasis masyarakat
- 8) Peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM). Upaya yang dapat dilakukan adalah mengirimkan pegawai untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan bidang perumahan, permukiman dan pertanahan, sehingga diperoleh aparatur yang berkualitas
- 9) Pemberantasan daerah tertinggal dan terisolir. Hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan pembangunan yang terarah dan berkeadilan di daerah tertinggal baik dalam hal peningkatan kualitas perumahan dan pemenuhan ketersediaan cakupan air bersih, sanitasi, dan listrik.
- 10) Pembangunan Infrastruktur Sarana Prasarana Wilayah. Upaya yang dapat dilakukan adalah peningkatan pekerjaan pembangunan infrastruktur dan PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas) di wilayah perumahan.
- 11) Belum adanya program jangka panjang yang akan digunakan sebagai pedoman penyusunan program (Rencana Induk Sistem) maupun validitas database tentang Perumahan dan PSU yang dikelola oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Pasaman Barat. Hal ini dapat diatasi dengan melakukan pembuatan database yang terstruktur dan sistematis.

- 12) Program pembangunan masih bersifat parsial, belum ada sinkronisasi yang efektif dan efisien antara OPD maupun instansi terkait. Untuk itu perlu dilakukan sinkronisasi dan koordinasi yang efektif serta berkesinambungan dalam hal pembangunan perumahan.
- 13) Belum terciptanya mekanisme monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan yang tepat dan akurat. Untuk itu perlu dibuat sistem yang baik dalam hal monitoring dan evaluasi pembangunan dibidang perumahan

#### **2.4. Telaahan Terhadap Rancangan Awal RKPD**

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasaman Barat membutuhkan pagu anggaran sebesar Rp. 30.074.895.285,- (tiga puluh milyar tujuh puluh empat juta delapan ratus Sembilan puluh lima ribu dua ratus delapan puluh lima rupiah) untuk pencapaian target kinerja pada tahun 2021. Pagu dana tersebut diproyeksikan untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan serta sub kegiatan yaitu sebanyak 13 (tiga belas) program dan 20 (dua puluh ) kegiatan serta 35 (tiga puluh lima) sub kegiatan yang telah direncanakan.

Adapun telaahan terhadap rancangan awal RKPD Tahun 2021 dapat disajikan pada Tabel berikut:

**Tabel 2.4.**  
**Telaahan Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2021**  
**Kabupaten Pasaman Barat**

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan			
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif
	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG</b>								
I	<b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH</b>								
1	<b>Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>		Persentase Rumah Yang Memiliki Pengelolaan Air Limbah yang baik						
	Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Rumah yang Pengelolaan Air Limbah Domestik yang layak (Sumber dana DAK)		7.529.294.000				
II	<b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN</b>								



	<b>PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE</b>								
1	<b>Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>								
	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1.710.403.252				
III	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN</b>								
1	<b>Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota</b>								
	Pembangunan Jalan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			12.613.686.474				
	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN</b>								

IV	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>								
1	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>								
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah PNS yang mendapat gaji dan tunjangan		2.602.383.199				
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Non PNS (PTT/THL) penunjang administrasi perkantoran		312.650.000				
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Penyediaan honorarium petugas pengelola keuangan		268.900.000				
2	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>								

	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1. Jumlah Peralatan Kantor Yang Dipelihara		40.350.000				
			2. Honor dan Uang Makan THL Jaga Malam						
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah ASN / THL Penatausahaan Barang Milik Daerah (Honor Pengurus Barang)		27.000.000				
3	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>								
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah ASN yang mengikuti Bimtek Peningkatan Kapasitas Pegawai		32.376.000				
4	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>								

	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah pemenuhan kebutuhan penerangan dan instalasi listrik penunjang operasional kantor		4.000.000				
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah ATK yang dibutuhkan Jumlah Materai		40.336.600				
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah penyediaan peralatan rumah tangga dan alat pembersih		17.573.160				
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Blanko SPT, SPPD, Kuitansi dan map DPKP yang dibutuhkan		26.995.100				
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah koordinasi dari pemerintah provinsi dan pusat (K/L) yang diikuti		66.584.000				

5	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>								
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Frekuensi penyediaan kebutuhan listrik dan air untuk operasional kantor		44.040.000				
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1. Jumlah penyediaan Jasa pembersihan kantor		30.920.000				
			2. Jumlah Non PNS (THL) yang melaksanakan tugas K3						
6	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>								
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan,	Jumlah kendaraan dinas yang akan dilakukan pemeliharaan dan		74.747.500				

	Jabatan	Semua Kelurahan	pembayaran pajak/KIR						
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah alat elektronik penunjang operasional administrasi perkantoran yang dipelihara		32.460.000				
V	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN</b>								
1	<b>Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota</b>								
	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah data perumahan di lokasi rawan bencana/relokasi		14.448.000				
	Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah data rumah korban bencana yang belum tertangani		15.060.000				

VI	<b>PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN</b>								
1	<b>Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman</b>								
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh		223.270.000				
2	<b>Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha</b>								
	Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah data lokasi kawasan kumuh sesuai keadaan eksisting di kabupaten pasamaman barat		400.000.000				
3	<b>Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di</b>								

	Bawah 10 (sepuluh) Ha								
	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah rumah tidak layak huni yang di perbaiki		1.766.541.000				
VII	<b>PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH</b>								
1	<b>Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota</b>								
	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	jumlah Rumah Tidak Layak Huni diluar Kawasan Kumuh yang diperbaiki		1.828.160.000				
	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>								



	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN</b>								
<b>I</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN IZIN LOKASI</b>								
<b>1</b>	<b>Pemberian Izin Lokasi Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>								
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Lokasi Penanaman Modal dan Kemudahan Berusaha	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah koordinasi pemberian izin lokasi berdasarkan aspek penanaman modal dan kemudahan berusaha		19.416.000				
<b>II</b>	<b>PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN</b>								
<b>1</b>	<b>Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>								
	Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah peta sengketa, konflik dan perkara pertanahan dalam kabupaten		19.598.000				

	Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah kasus yang diselesaikan sengketa tanah garapan dalam kabupaten		24.088.000				
<b>III</b>	<b>PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN</b>								
<b>1</b>	<b>Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>								
	Penetapan Daftar Masyarakat Penerima Santunan Tanah dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah dokumen penetapan penerima ganti rugi santunan tanah dalam kabupaten		18.060.000				
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Koordinasi masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh pemerintah daerah		150.864.000				

IV	<b>PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, SERTA GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE</b>								
1	<b>Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>								
	Inventarisasi Subjek dan Objek Redistribusi Tanah	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah subyek dan obyek redistribusi tanah dalam kabupaten		21.060.000				
	Inventarisasi dan Rekomendasi Objek Redistribusi Tanah	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah rekomendasi obyek redistribusi tanah		21.060.000				
	Koordinasi Penyelenggaraan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah penyelenggaraan redistribusi tanah obyek reforma agraria dalam kabupaten dengan baik		22.060.000				

	Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah koordinasi akses dalam pemanfaatan redistribusi tanah dalam kabupaten		19.260.000				
<b>V</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG</b>								
<b>1</b>	<b>Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong</b>								
	Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah data inventaris tanah kosong dalam kabupaten		15.975.000				
<b>VI</b>	<b>PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH</b>								
<b>1</b>	<b>Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota</b>								
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan,	Jumlah koordinasi pelaksanaan konsolidasi tanah dalam kabupaten		21.276.000				

		Semua Kelurahan							
	JUMLAH				30.074.895.285				

## **2.5. Penelaahan Usulan Program dari Masyarakat**

Mengingat tugas pokok dan fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasaman Barat adalah menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman dan bidang pertanahan memiliki peran dan fungsi strategis dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan, sehingga memfasilitasi agar senantiasa dapat menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat secara proporsional sebagai wujud dari fungsi OPD yang melayani masyarakat.

Proses yang telah dilakukan dalam menampung aspirasi serta menelaah semua usulan program yang akan dituangkan dalam Renja OPD 2021 adalah :

1. Menampung aspirasi masyarakat melalui forum musrenbang kecamatan dan Forum OPD.
2. Melakukan kunjungan lapangan untuk melihat lokasi yang diusulkan serta melakukan pengukuran.
3. Menuangkan usulan program tersebut dalam renja dan DPA OPD.

### **BAB III**

#### **TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

##### **3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional**

Seperti tertuang dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024, terdapat 9 agenda pembangunan nasional yang tertuang dalam nawacita pemerintah yang akan dilaksanakan selama kurun waktu tahun 2014-2019, yakni:

1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara.
2. Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya.
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.
4. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia.
6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya.
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.
8. Melakukan revolusi karakter bangsa.
9. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia

Sementara itu, Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 menyebutkan bahwa penekanan dan skala prioritas RPJMD kurun waktu 2016-2021 adalah sebagai berikut:

1. Pembangunan mental dan pengamalan agama dan ABS-SBK dalam kehidupan masyarakat.
2. Pelaksanaan reformasi birokrasi dalam pemerintahan.
3. Peningkatan pemerataan dan kualitas pendidikan.

4. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat.
5. Kedaulatan pangan dan pengembangan agribisnis.
6. Pengembangan pariwisata, industri, perdagangan, koperasi, dan investasi.
7. Pengembangan kemaritiman dan kelautan.
8. Penurunan tingkat kemiskinan, pengangguran, daerah tertinggal.
9. Pengembangan energi dan pembangunan infrastruktur.
10. Pelestarian lingkungan hidup dan penanggulangan bencana

Kemampuan pengembangan dan pemanfaatan teknologi maju akan meningkatkan daya saing produk dan jasa dari wilayah Provinsi Sumatera Barat, sehingga dapat ditingkatkan nilai tambah yang dapat diterima masyarakat, baik petani, nelayan, pedagang, dan pengusaha jasa, termasuk jasa pendidikan dan jasa kesehatan. Dengan demikian, tingkat pengangguran dan kemiskinan akan dapat dikurangi, sehingga akses masyarakat ke bidang pendidikan dan kesehatan juga semakin membaik. Secara lebih rinci, arah kebijakan nasional dan provinsi pada periode 2016-2021 dapat dituangkan pada tabel 3.1 berikut:

**Tabel 3.1.**  
**Identifikasi Kebijakan Nasional dan Provinsi**  
**Kabupaten Pasaman Barat**

No	Prioritas Nasional /Program Prioritas Nasional RKP Tahun 2021	Prioritas Pembangunan RKPD Propinsi Sumatera Barat Tahun 2021	Prioritas Pembangunan RKPD Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2021	Program Pembangunan RKPD Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2021
<b>I</b>	<b>Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan:</b> a) Perlindungan Sosial dan Tata Kelola Kependudukan b) Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan c) Pemerataan Layanan Pendidikan dan Pengembangan Iptek- Inovasi	1. Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Pengangguran serta Penanganan Daerah Tertinggal	1. Penanggulangan kemiskinan pengangguran dan daerah tertinggal berbasis pemberdayaan keluarga dan masyarakat	• Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Keluarga
				• Program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan
				• Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
				• Program pembinaan panti asuhan /panti jompo
				• Program pengembangan wawasan kebangsaan
				• Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan
				• Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
				• Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Nagari/Perdesaan
				• Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa
				• Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan



No	Prioritas Nasional /Program Prioritas Nasional RKP Tahun 2021	Prioritas Pembangunan RKPDP Propinsi Sumatera Barat Tahun 2021	Prioritas Pembangunan RKPDP Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2021	Program Pembangunan RKPDP Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2021
	d) Pengentasan Kemiskinan e) Pembangunan Budaya Karakter, dan Prestasi bangsa	2. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat	2. Pembangunan kualitas sumber daya manusia pembangunan pendidikan dan kesehatan yang berwawasan kependudukan dan kesetaraan gender	• Program Upaya Kesehatan Masyarakat
				• Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
				• Program obat dan perbekalan kesehatan
				• Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak
				• Program Perbaikan Gizi Masyarakat dan Kesehatan Keluarga
				• Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
				• Program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular
				• Program pengawasan obat dan makanan
				• Program pengembangan lingkungan sehat
				• Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan
				• Program peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan
				• Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
		3. Peningkatan Pemerataan dan Kualitas Pendidikan	3. Pembangunan kualitas sumber daya manusia pembangunan pendidikan dan kesehatan yang berwawasan kependudukan dan kesetaraan gender	• Program Pendidikan Anak Usia Dini
				• Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
				• Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
				• Program Peningkatan Kualitas Hasil Belajar
				• Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
				• Program Pendidikan Non Formal
		4. Pembangunan mental dan pengamalan agama dan Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi kitabullah (ABS-SBK) dalam kehidupan masyarakat	4. Pengamalan ajaran agama dalam kehidupan masyarakat dan pengembangan nilai-nilai luhur kebudayaan melalui pendidikan karakter	• Program bantuan Operasional Sekolah
				• Program Peningkatan pemahaman, pengetahuan, pengamalan dan pengembangan nilai keagamaan
				• Program Pengembangan Prestasi Keagamaan
				• Program pengembangan wawasan kebangsaan
				• Program peningkatan peran serta kepemudaan
				• Program peningkatan upaya

No	Prioritas Nasional /Program Prioritas Nasional RKP Tahun 2021	Prioritas Pembangunan RKPDP Propinsi Sumatera Barat Tahun 2021	Prioritas Pembangunan RKPDP Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2021	Program Pembangunan RKPDP Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2021
				<p>penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Program Pengembangan Nilai Budaya</li> </ul>
II	<b>Infrastruktur dan Pemerataan Wilayah:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>Perluasan Infrastruktur Dasar</li> <li>Penguatan Infrastruktur Daerah Tertinggal, dan Ketahanan Bencana</li> <li>Penguatan Konektivitas Multimoda dan antar moda Mendukung Pertumbuhan Ekonomi</li> <li>Peningkatan Infrastruktur Perkotaan</li> <li>Transformasi Digital</li> </ol>	1. Pengembangan Sumber Energi Baru dan Terbarukan serta Pembangunan Infrastruktur	1. Pembangunan infrastruktur sarana prasarana wilayah	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Program Pembangunan Jalan dan Jembatan</li> <li>• Program Pengembangan Perumahan</li> <li>• Program Pembangunan dan Peningkatan Infrastruktur Kawasan Perkotaan</li> <li>• Program Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal</li> <li>• Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah</li> <li>• Program perencanaan pembangunan daerah</li> <li>• Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam</li> <li>• Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong</li> <li>• Program rehabilitasi/ pemeliharaan jalan dan jembatan</li> <li>• Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya</li> <li>• Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah</li> <li>• Program Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana</li> <li>• Program Pemulihan Daerah Pasca Bencana</li> <li>• Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi</li> <li>• Program Pengembangan Data/ Informasi</li> <li>• Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan</li> <li>• Program Peningkatan Pelayanan Angkutan</li> <li>• Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas</li> <li>• Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa</li> <li>• Program kerjasama informasi dengan mas media</li> </ul>
			2. Pembangunan wilayah	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Program Perencanaan Tata Ruang</li> </ul>

No	Prioritas Nasional /Program Prioritas Nasional RKP Tahun 2021	Prioritas Pembangunan RKPDP Propinsi Sumatera Barat Tahun 2021	Prioritas Pembangunan RKPDP Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2021	Program Pembangunan RKPDP Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2021
			yang berkeadilan sesuai dengan penataan ruang	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang</li> <li>• Program Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal</li> </ul>
III	<b>Nilai Tambah Sektor Riil, Industrialisasi, dan Kesempatan Kerja:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penguata Kewirausahaan dan UKM</li> <li>2. Peningkatan Nilai Tambah dan Investasi, Sektor Riil dan Industrialisasi</li> <li>3. Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja dan Penciptaan Lapangan Kerja</li> <li>4. Peningkatan Ekspor Bernilai Tambah Tinggi dan Penguatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN)</li> <li>5. Penguatan Pilar Pertumbuhan dan Daya Saing Ekonomi</li> </ol>	1. Pengembangan Pariwisata, Industri, Perdagangan, Koperasi, UMKM, dan Peningkatan Investasi	1. Pemberdayaan koperasi, IKM dan UMKM	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Program pembinaan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif UMKM</li> <li>• Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan</li> <li>• Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan</li> <li>• Program peningkatan dan pengembangan ekspor</li> <li>• Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri</li> <li>• Pengembangan Industri Kecil dan Menengah</li> </ul>
			2. Pengembangan perdagangan, Investasi, Jasa, Pariwisata dan Industri Kreatif melalui Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Program peningkatan dan pengembangan ekspor</li> <li>• Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri</li> <li>• Pengembangan Industri Kecil dan Menengah</li> <li>• Program Peningkatan Kesempatan Kerja</li> <li>• Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan</li> <li>• Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi</li> <li>• Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi</li> <li>• Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi</li> <li>• Peningkatan Pelayanan, Sarana dan Prasarana Perizinan dan Non Perizinan</li> <li>• Program pengembangan destinasi pariwisata</li> <li>• Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata</li> <li>• Program Pengelolaan Keragaman Budaya</li> <li>• Program pengembangan Industri Kreatif</li> </ul>
		2. Peningkatan Pemanfaatan Potensi Kemaritiman dan Kelautan	3. Peningkatan kedaulatan pangan, agroindustri dan kemaritiman	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Program pengembangan budidaya perikanan</li> <li>• Program pengembangan perikanan tangkap</li> <li>• Program optimalisasi pengelolaan</li> </ul>

No	Prioritas Nasional /Program Prioritas Nasional RKP Tahun 2021	Prioritas Pembangunan RKPDP Propinsi Sumatera Barat Tahun 2021	Prioritas Pembangunan RKPDP Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2021	Program Pembangunan RKPDP Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2021
				dan pemasaran produksi perikanan • Program Peningkatan Katahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan) • Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan • Program Peningkatan Kesejahteraan Petani • Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan • Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan • Program peningkatan produksi hasil peternakan
IV	<b>Ketahanan Pangan, Air , Energi, dan Lingkungan Hidup:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketersediaan Akses dan Kualitas Konsumsi Pangan</li> <li>2. Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Aksesibilitas Air</li> <li>3. Pemenuhan Kebutuhan Energi melalui Penyediaan Energi Baru dan Terbarukan (EBT)</li> <li>4. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup</li> <li>5. Penguatan Ketahanan Bencana</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan Produksi Untuk Mendukung Kedaulatan Pangan Nasional dan Pengembangan Agribisnis.</li> <li>2. Pengembangan Sumber Energi Baru dan Terbarukan serta Pembangunan Infrastruktur</li> <li>3. Pelestarian Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan kedaulatan pangan, agroindustri dan kemaritiman</li> <li>2. Pembangunan infrastruktur sarana prasarana wilayah</li> <li>3. Pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>• Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan</li> <li>• Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan</li> <li>• Program Peningkatan Katahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)</li> <li>• Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan</li> <li>• Program pengembangan budidaya perikanan</li> <li>• Program pengembangan perikanan tangkap</li> <li>• Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya</li> <li>• Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah</li> <li>• Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan</li> <li>• Program Pengembangan kinerja pengelolaan persampahan</li> <li>• Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup</li> <li>• Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam</li> <li>• Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup</li> <li>• Program peningkatan pengendalian polusi</li> <li>• Program Perencanaan Tata Ruang</li> <li>• Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang</li> <li>• Program Kesiapsiagaan Menghadapi</li> </ol>

No	Prioritas Nasional /Program Prioritas Nasional RKP Tahun 2021	Prioritas Pembangunan RKP Propinsi Sumatera Barat Tahun 2021	Prioritas Pembangunan RKP Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2021	Program Pembangunan RKP Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2021
				Bencana • Program Peningkatan Kelembagaan Kebencanaan • Program Peningkatan Tanggap Darurat Bencana • Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan korban Bencana Alam • Program Pemulihan Daerah Pasca Bencana
V	<b>Stabilitas Pertahanan dan Keamanan:</b> 1. Penguatan Kemampuan Pertahanan 2. Peningkatan Diplomasi Politik dan Kerjasama Pembangunan Internasional 3. Penguatan Sistem Peradilan dan Upaya Anti Korupsi 4. Penanggulangan Terorisme dan Peningkatan Keamanan Siber, dan Penguatan Keamanan Laut 5. Penanggulangan Narkotika dan Penguatan Kamtibmas	1. Pembangunan mental dan pengamalan agama dan Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi kitabullah (ABS-SBK) dalam kehidupan masyarakat 2. Pelaksanaan reformasi birokrasi dalam pemerintahan	1. Pengamalan ajaran agama dalam kehidupan masyarakat dan pengembangan nilai-nilai luhur kebudayaan melalui pendidikan karakter 2. Penerapan tata kelola pemerintahan yang baik dan reformasi birokrasi	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan Program pemeliharaan kantrati-bimas dan pencegahan tindak kriminal Program pendidikan politik masyarakat Program penataan peraturan perundang-undangan Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat) Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan

### 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja OPD

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang dijalankan, selain menjalankan program rutin, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten

Pasaman Barat bertugas membantu Kepala Daerah dalam penyusunan program pengambilan kebijakan bidang perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan

Secara umum, rencana program dan kegiatan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2021 tertuang dalam 15 (program) program yang didukung oleh 21 (Dua Puluh Satu) kegiatan, seperti terlihat pada tabel berikut:

### **3.3. Program dan Kegiatan**

Dalam upaya mewujudkan program dan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan rencana tahun 2016-2021 akan direalisasikan secara bertahap dan dengan pendekatan prioritas kegiatan dengan prinsip pelayanan kepada masyarakat. Untuk mendukung dalam merealisasikan program dan kegiatan tersebut dibutuhkan dana yang tidak hanya melalui dana APBD saja namun juga dengan mengusulkan melalui dana yang bersumber dari APBD Propinsi Sumatera Barat dan APBN. Secara garis besar, rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut :

No.	Program/Kegiatan
	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG</b>
<b>I</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH</b>
1	<b>Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>
	Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat
<b>II</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE</b>
1	<b>Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>
	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan
<b>III</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN</b>
1	<b>Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota</b>
	Pembangunan Jalan
	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN</b>
<b>I</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>
1	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
2	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>
	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
3	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
4	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
5	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
6	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
<b>II</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN</b>

1	<b>Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota</b>
	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota
	Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani
III	<b>PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN</b>
1	<b>Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman</b>
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh
2	<b>Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha</b>
	Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh
3	<b>Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha</b>
	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni
VI	<b>PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH</b>
1	<b>Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota</b>
	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha
	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>
	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN</b>
I	<b>PROGRAM PENGELOLAAN IZIN LOKASI</b>
1	<b>Pemberian Izin Lokasi Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Lokasi Penanaman Modal dan Kemudahan Berusaha
II	<b>PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN</b>
1	<b>Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>
	Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
	Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
III	<b>PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN</b>
1	<b>Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>
	Penetapan Daftar Masyarakat Penerima Santunan Tanah dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
IV	<b>PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, SERTA GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE</b>



1	<b>Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>
	Inventarisasi Subjek dan Objek Redistribusi Tanah
	Inventarisasi dan Rekomendasi Objek Redistribusi Tanah
	Koordinasi Penyelenggaraan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota
<b>V</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG</b>
1	<b>Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong</b>
	Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong
<b>VI</b>	<b>PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH</b>
1	<b>Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota</b>
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota

No.	Program/Kegiatan
	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG</b>
<b>I</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH</b>
1	<b>Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>
	Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat
<b>II</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE</b>
1	<b>Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>
	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan
<b>III</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN</b>
1	<b>Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota</b>
	Pembangunan Jalan
	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN</b>
<b>I</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>
1	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
2	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>
	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
3	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
4	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
5	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
6	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
<b>II</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN</b>
1	<b>Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota</b>
	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota
	Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani
<b>III</b>	<b>PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN</b>
1	<b>Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman</b>
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh
2	<b>Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha</b>
	Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh
3	<b>Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha</b>
	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni
<b>VI</b>	<b>PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH</b>
1	<b>Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota</b>
	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha
	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN</b>

## **TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

### **3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional**

Seperti tertuang dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2014-2019, terdapat 9 agenda pembangunan nasional yang tertuang dalam nawacita pemerintah yang akan dilaksanakan selama kurun waktu tahun 2014-2019, yakni:

1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara.
2. Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya.
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.
4. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia.
6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya.
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.
8. Melakukan revolusi karakter bangsa.
9. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia

Sementara itu, Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 menyebutkan bahwa penekanan dan skala prioritas RPJMD kurun waktu 2016-2021 adalah sebagai berikut:

1. Pembangunan mental dan pengamalan agama dan ABS-SBK dalam kehidupan masyarakat.
2. Pelaksanaan reformasi birokrasi dalam pemerintahan.
3. Peningkatan pemerataan dan kualitas pendidikan.
4. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat.
5. Kedaulatan pangan dan pengembangan agribisnis.
6. Pengembangan pariwisata, industri, perdagangan, koperasi, dan investasi.
7. Pengembangan kemaritiman dan kelautan.
8. Penurunan tingkat kemiskinan, pengangguran, daerah tertinggal.
9. Pengembangan energi dan pembangunan infrastruktur.
10. Pelestarian lingkungan hidup dan penanggulangan bencana

Kemampuan pengembangan dan pemanfaatan teknologi maju akan meningkatkan daya saing produk dan jasa dari wilayah Provinsi Sumatera Barat, sehingga dapat ditingkatkan nilai tambah yang dapat diterima masyarakat, baik petani,

nelayan, pedagang, dan pengusaha jasa, termasuk jasa pendidikan dan jasa kesehatan. Dengan demikian, tingkat pengangguran dan kemiskinan akan dapat dikurangi, sehingga akses masyarakat ke bidang pendidikan dan kesehatan juga semakin membaik. Secara lebih rinci, arah kebijakan nasional dan provinsi pada periode 2016-2021 dapat dituangkan pada tabel 3.1 berikut:

**Tabel 3.1.**  
**Identifikasi Kebijakan Nasional dan Provinsi**  
**Kabupaten Pasaman Barat**

No	Prioritas Nasional /Program Prioritas Nasional RKP Tahun 2021	Prioritas Pembangunan RKPDP Propinsi Sumatera Barat Tahun 2021	Prioritas Pembangunan RKPDP Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2021	Program Pembangunan RKPDP Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2021
I	<b>Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan:</b> a) Perlindungan Sosial dan Tata Kelola Kependudukan b) Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan c) Pemerataan Layanan Pendidikan dan Pengembangan Iptek-Inovasi d) Pengentasan Kemiskinan e) Pembangunan Budaya Karakter, dan Prestasi bangsa	1. Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Pengangguran serta Penanganan Daerah Tertinggal	1. Penanggulangan kemiskinan pengangguran dan daerah tertinggal berbasis pemberdayaan keluarga dan masyarakat	• Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Keluarga
				• Program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan
				• Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
				• Program pembinaan panti asuhan /panti jompo
				• Program pengembangan wawasan kebangsaan
				• Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan
				• Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
				• Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Nagari/Perdesaan
				• Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa
				• Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan
		2. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat	2. Pembangunan kualitas sumber daya manusia pembangunan pendidikan dan kesehatan yang berwawasan kependudukan dan kesetaraan gender	• Program Upaya Kesehatan Masyarakat
				• Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
				• Program obat dan perbekalan kesehatan
				• Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak
				• Program Perbaikan Gizi Masyarakat dan Kesehatan Keluarga
				• Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
				• Program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular
				• Program pengawasan obat dan makanan
				• Program pengembangan lingkungan sehat
				• Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan
				• Program peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan
				• Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
		3. Peningkatan Pemerataan dan Kualitas	3. Pembangunan kualitas sumber daya manusia pembangunan	• Program Pendidikan Anak Usia Dini
				• Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan

No	Prioritas Nasional /Program Prioritas Nasional RKP Tahun 2021	Prioritas Pembangunan RKPD Propinsi Sumatera Barat Tahun 2021	Prioritas Pembangunan RKPD Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2021	Program Pembangunan RKPD Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2021
		Pendidikan	pendidikan dan kesehatan yang berwawasan kependudukan dan kesetaraan gender	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun</li> <li>• Program Peningkatan Kualitas Hasil Belajar</li> <li>• Program Manajemen Pelayanan Pendidikan</li> <li>• Program Pendidikan Non Formal</li> <li>• Program bantuan Operasional Sekolah</li> </ul>
		4. Pembangunan mental dan pengamalan agama dan Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi kitabullah (ABS-SBK) dalam kehidupan masyarakat	4. Pengamalan ajaran agama dalam kehidupan masyarakat dan pengembangan nilai-nilai luhur kebudayaan melalui pendidikan karakter	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Program Peningkatan pemahaman, pengetahuan, pengamalan dan pengembangan nilai keagamaan</li> <li>• Program Pengembangan Prestasi Keagamaan</li> <li>• Program pengembangan wawasan kebangsaan</li> <li>• Program peningkatan peran serta kepemudaan</li> <li>• Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda</li> <li>• Program Pengembangan Nilai Budaya</li> </ul>
		1. Pengembangan Sumber Energi Baru dan Terbarukan serta Pembangunan Infrastruktur	1. Pembangunan infrastruktur sarana prasarana wilayah	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Program Pembangunan Jalan dan Jembatan</li> <li>• Program Pengembangan Perumahan</li> <li>• Program Pembangunan dan Peningkatan Infrastruktur Kawasan Perkotaan</li> <li>• Program Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal</li> <li>• Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah</li> <li>• Program perencanaan pembangunan daerah</li> <li>• Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam</li> <li>• Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong</li> <li>• Program rehabilitasi/ pemeliharaan jalan dan jembatan</li> <li>• Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya</li> <li>• Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah</li> <li>• Program Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana</li> <li>• Program Pemulihan Daerah Pasca Bencana</li> <li>• Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi</li> <li>• Program Pengembangan Data/ Informasi</li> <li>• Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan</li> <li>• Program Peningkatan Pelayanan Angkutan</li> <li>• Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas</li> <li>• Program Pengembangan</li> </ul>
II	<b>Infrastruktur dan Pemerataan Wilayah:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Perluasan Infrastruktur Dasar</li> <li>b) Penguatan Infrastruktur Daerah Tertinggal, dan Ketahanan Bencana</li> <li>c) Penguatan Konektivitas Multimoda dan antar moda Mendukung Pertumbuhan Ekonomi</li> <li>d) Peningkatan Infrastruktur Perkotaan</li> <li>e) Transformasi Digital</li> </ol>			

No	Prioritas Nasional /Program Prioritas Nasional RKP Tahun 2021	Prioritas Pembangunan RKPD Propinsi Sumatera Barat Tahun 2021	Prioritas Pembangunan RKPD Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2021	Program Pembangunan RKPD Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2021
				Komunikasi, Informasi dan Media Massa
				<ul style="list-style-type: none"> <li>Program kerjasama informasi dengan mas media</li> </ul>
			2. Pembangunan wilayah yang berkeadilan sesuai dengan penataan ruang	<ul style="list-style-type: none"> <li>Program Perencanaan Tata Ruang</li> <li>Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang</li> <li>Program Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal</li> </ul>
III	<b>Nilai Tambah Sektor Riil, Industrialisasi, dan Kesempatan Kerja:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penguata Kewirausahaan dan UKM</li> <li>2. Peningkatan Nilai Tambah dan Investasi, Sektor Riil dan Industrialisasi</li> <li>3. Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja dan Penciptaan Lapangan Kerja</li> <li>4. Peningkatan Ekspor Bernilai Tambah Tinggi dan Penguatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN)</li> <li>5. Penguatan Pilar Pertumbuhan dan Daya Saing Ekonomi</li> </ol>	1. Pengembangan Pariwisata, Industri, Perdagangan, Koperasi, UMKM, dan Peningkatan Investasi	1. Pemberdayaan koperasi,IKM dan UMKM	<ul style="list-style-type: none"> <li>Program pembinaan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif UMKM</li> <li>Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan</li> <li>Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan</li> <li>Program peningkatan dan pengembangan ekspor</li> <li>Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri</li> <li>Pengembangan Industri Kecil dan Menengah</li> </ul>
			2. Pengembangan perdagangan,Investasi, Jasa, Pariwisata dan Industri Kreatif melalui Peningkatan Kualitas Tanaga Kerja	<ul style="list-style-type: none"> <li>Program peningkatan dan pengembangan ekspor</li> <li>Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri</li> <li>Pengembangan Industri Kecil dan Menengah</li> <li>Program Peningkatan Kesempatan Kerja</li> <li>Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan</li> <li>Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi</li> <li>Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi</li> <li>Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi</li> <li>Peningkatan Pelayanan, Sarana dan Prasarana Perizinan dan Non Perizinan</li> <li>Program pengembangan destinasi pariwisata</li> <li>Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata</li> <li>Program Pengelolaan Keragaman Budaya</li> <li>Program pengembangan Industri Kreatif</li> </ul>
		2. Peningkatan Pemanfaatan Potensi Kemaritiman dan Kelautan	3. Peningkatan kedauletan pangan, agroindustri dan kemaritiman	<ul style="list-style-type: none"> <li>Program pengembangan budidaya perikanan</li> <li>Program pengembangan perikanan tangkap</li> <li>Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan</li> <li>Program Peningkatan Katahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)</li> <li>Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan</li> <li>Program Peningkatan Kesejahteraan Petani</li> <li>Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan</li> </ul>

No	Prioritas Nasional /Program Prioritas Nasional RKP Tahun 2021	Prioritas Pembangunan RKPDP Propinsi Sumatera Barat Tahun 2021	Prioritas Pembangunan RKPDP Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2021	Program Pembangunan RKPDP Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2021
				<ul style="list-style-type: none"> <li>Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan</li> <li>Program peningkatan produksi hasil peternakan</li> </ul>
IV	<b>Ketahanan Pangan, Air , Energi, dan Lingkungan Hidup:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>Ketersediaan Akses dan Kualitas Konsumsi Pangan</li> <li>Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Aksesibilitas Air</li> <li>Pemenuhan Kebutuhan Energi melalui Penyediaan Energi Baru dan Terbarukan (EBT)</li> <li>Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup</li> <li>Penguatan Ketahanan Bencana</li> </ol>	1. Peningkatan Produksi Untuk Mendukung Kedaulatan Pangan Nasional dan Pengembangan Agribisnis.	1. Peningkatan kedaulatan pangan, agroindustri dan kemaritiman	<ul style="list-style-type: none"> <li>Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan</li> <li>Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan</li> <li>Program Peningkatan Katahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)</li> <li>Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan</li> <li>Program pengembangan budidaya perikanan</li> <li>Program pengembangan perikanan tangkap</li> </ul>
		2. Pengembangan Sumber Energi Baru dan Terbarukan serta Pembangunan Infrastruktur	2. Pembangunan infrastruktur sarana prasarana wilayah	<ul style="list-style-type: none"> <li>Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya</li> <li>Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah</li> <li>Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan</li> </ul>
		3. Pelestarian Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana	3. Pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Program Pengembangan kinerja pengelolaan persampahan</li> <li>Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup</li> <li>Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam</li> <li>Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup</li> <li>Program peningkatan pengendalian polusi</li> <li>Program Perencanaan Tata Ruang</li> <li>Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang</li> <li>Program Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana</li> <li>Program Peningkatan Kelembagaan Kebencanaan</li> <li>Program Peningkatan Tanggap Darurat Bencana</li> <li>Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan korban Bencana Alam</li> <li>Program Pemulihan Daerah Pasca Bencana</li> </ul>
		1. Pembangunan mental dan pengamalan agama dan Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi kitabullah (ABS-SBK) dalam kehidupan masyarakat	1. Pengamalan ajaran agama dalam kehidupan masyarakat dan pengembangan nilai-nilai luhur kebudayaan melalui pendidikan karakter	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan Program pemeliharaan kantratribmas dan pencegahan tindak kriminal Program pendidikan politik masyarakat
		2. Pelaksanaan reformasi birokrasi dalam	2. Penerapan tata kelola pemerintahan yang baik dan reformasi	Program penataan peraturan perundang-undangan Program peningkatan sistem

No	Prioritas Nasional /Program Prioritas Nasional RKP Tahun 2021	Prioritas Pembangunan RKPD Propinsi Sumatera Barat Tahun 2021	Prioritas Pembangunan RKPD Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2021	Program Pembangunan RKPD Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2021
	3. Penguatan Sistem Peradilan dan Upaya Anti Korupsi 4. Penanggula n Terorisme dan Peningkatan Keamanan Siber, dan Penguatan Keamanan Laut 5. Penaggulanga n Narkotika dan Penguatan Kamtibmas	pemerintahan	birokrasi	pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat) Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan

### 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja OPD

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang dijalankan, selain menjalankan program rutin, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasaman Barat bertugas membantu Kepala Daerah dalam penyusunan program pengambilan kebijakan bidang perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan

Secara umum, rencana program dan kegiatan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2021 tertuang dalam 15 (program) program yang didukung oleh 21 (Dua Puluh Satu) kegiatan, seperti terlihat pada tabel berikut:

### 3.3. Program dan Kegiatan

Dalam upaya mewujudkan program dan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan rencana tahun 2016-2021 akan direalisasikan secara bertahap dan dengan pendekatan prioritas kegiatan dengan prinsip pelayanan kepada masyarakat. Untuk mendukung dalam merealisasikan program dan kegiatan tersebut dibutuhkan dana yang tidak hanya melalui dana APBD saja namun juga dengan mengusulkan melalui dana yang bersumber dari APBD Propinsi Sumatera Barat dan APBN. Secara garis besar, rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut :



No.	Program/Kegiatan
	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG</b>
<b>I</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH</b>
1	<b>Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>
	Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat
<b>II</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE</b>
1	<b>Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>
	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan
<b>III</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN</b>
1	<b>Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota</b>
	Pembangunan Jalan
	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN</b>
<b>I</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>
1	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
2	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>
	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
3	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
4	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
5	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
6	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
<b>II</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN</b>
1	<b>Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota</b>
	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota
	Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani
<b>III</b>	<b>PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN</b>
1	<b>Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman</b>
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh

2	<b>Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha</b>
	Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh
3	<b>Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha</b>
	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni
VI	<b>PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH</b>
1	<b>Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota</b>
	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha
	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>
	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN</b>
I	<b>PROGRAM PENGELOLAAN IZIN LOKASI</b>
1	<b>Pemberian Izin Lokasi Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Lokasi Penanaman Modal dan Kemudahan Berusaha
II	<b>PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN</b>
1	<b>Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>
	Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
	Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
III	<b>PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN</b>
1	<b>Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>
	Penetapan Daftar Masyarakat Penerima Santunan Tanah dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
IV	<b>PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, SERTA GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE</b>
1	<b>Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>
	Inventarisasi Subjek dan Objek Redistribusi Tanah
	Inventarisasi dan Rekomendasi Objek Redistribusi Tanah
	Koordinasi Penyelenggaraan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota
V	<b>PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG</b>
1	<b>Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong</b>
	Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong
VI	<b>PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH</b>
1	<b>Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota</b>
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota

## **BAB IV**

### **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN OPD**

Rencana Kerja dan Pendanaan untuk Kegiatan Tahun 2022 merupakan implementasi tahun ke-1 dari Rencana Strategis Tahun 2022-2026 yang secara simultan disusun sebagai dokumen Rencana Kerja Tahunan agar lebih fokus mendukung pencapaian tujuan strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2022-2026, yakni mewujudkan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman layak yang diukur melalui persentase pencapaian target kinerja RPJMD. Prioritas Pembangunan diterjemahkan kedalam 8 (delapan) sasaran prioritas pembangunan melalui pelaksanaan program/kegiatan pembangunan.

Unit Organisasi : 1.03.2.10.1.04.01.0000 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman  
Sub Unit Organisasi : 1.03.2.10.1.04.01.0000 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kabupaten Pasaman Barat  
Tahun 2021

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
1	03				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG								7,182,934,000	11,000,000,000				
1	03	05			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH								7,182,934,000	11,000,000,000				
1	03	05	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota								7,182,934,000	11,000,000,000				
1	03	05	2.01	06	Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	Persentase Rumah Yang Memeiliki Pengelolaan Air Limbah yang baik	Jumlah Rumah yang Mengelola Air Limbah Domestik yang layak		Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50 %	800 Rumah		6,180,894,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Fisik-Bidang Perumahan dan Permukiman -Reguler-Penyediaan Rumah Swadaya		Persentase Rumah Yang Memeiliki Pengelolaan Air Limbah yang baik	50 %	10,000,000,000
1	03	05	2.01	16	Rehabilitasi/Peningkatan/P erluasan Sarana dan Prasarana IPLT	Persentase Rumah Yang Memeiliki Pengelolaan Air Limbah yang baik	Jumlah Unit IPLT		Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50 %	1 Unit		952,040,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Rumah Yang Memeiliki Pengelolaan Air Limbah yang baik	50 %	1,000,000,000
1	03	05	2.01	17	Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi / Peningkatan/Perluasan Sarana dan Prasarana IPLT	Persentase Rumah Yang Memeiliki Pengelolaan Air Limbah yang baik	Jumlah Pengawasan/Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/P eningkatan/Perluasan Sarana dan Prasarana IPLT		Semua Kabupaten/Ko ta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50 %	1 Paket		50,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Rumah Yang Memeiliki Pengelolaan Air Limbah yang baik	50 %	0
1	04				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN								8,690,261,285	14,739,750,800				
1	04	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								3,685,352,047	4,294,750,800				
1	04	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								3,018,402,047	3,253,080,000				
1	04	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase terpenuhinya kegiatan penunjang operasional perangkat daerah	Jumlah PNS yang mendapat gaji dan tunjangan		Semua Kabupaten/Ko ta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	13 Bulan		2,602,362,047	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase terpenuhinya kegiatan penunjang operasional perangkat daerah	100 %	2,700,000,000
1	04	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase terpenuhinya kegiatan penunjang operasional perangkat daerah	Jumlah Non PNS PTT Penunjang Administrasi Perkantoran Jumlah Non PNS THL Penunjang Administrasi Perkantoran		Semua Kabupaten/Ko ta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	13 Bulan 13 Bulan		316,650,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase terpenuhinya kegiatan penunjang operasional perangkat daerah	100 %	316,650,000
1	04	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase terpenuhinya kegiatan penunjang operasional perangkat daerah	Penyediaan Honorarium Petugas Pengelola Keuangan		Semua Kabupaten/Ko ta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Bulan		99,390,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase terpenuhinya kegiatan penunjang operasional perangkat daerah	100 %	236,430,000
1	04	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah								67,350,000	102,000,000				

Unit Organisasi : 1.03.2.10.1.04.01.0000 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Sub Unit Organisasi : 1.03.2.10.1.04.01.0000 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Kabupaten Pasaman Barat

Tahun 2021

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	04	01	2.03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Persentase terpenuhinya kegiatan penunjang operasional perangkat daerah	Honorarium dan Uang Makan THL Jaga Malam Jumlah Peralatan Kantor yang dipelihara		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	2 Orang 405 Unit		40,350,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase terpenuhinya kegiatan penunjang operasional perangkat daerah	100 %	75,000,000
1	04	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase terpenuhinya kegiatan penunjang operasional perangkat daerah	Jumlah ASN/THL Penatausahaan Barang Milik Daerah (Honorarium Pengurus BMD)		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	2 Orang		27,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase terpenuhinya kegiatan penunjang operasional perangkat daerah	100 %	27,000,000
1	04	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								100,000,000	120,000,000				
1	04	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase terpenuhinya kegiatan penunjang operasional perangkat daerah	Jumlah ASN yang mengikuti Diklat Prajabatan dan Diklat Kepemimpinan (PIM)		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Orang		20,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase terpenuhinya kegiatan penunjang operasional perangkat daerah	100 %	30,000,000
1	04	01	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase terpenuhinya kegiatan penunjang operasional perangkat daerah	Jumlah ASN yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	24 Orang		30,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase terpenuhinya kegiatan penunjang operasional perangkat daerah	100 %	40,000,000
1	04	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase terpenuhinya kegiatan penunjang operasional perangkat daerah	Jumlah ASN yang mengikuti Bimtek Peningkatan Kapasitas Pegawai		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	24 Orang		50,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase terpenuhinya kegiatan penunjang operasional perangkat daerah	100 %	50,000,000
1	04	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								207,000,000	377,070,800				
1	04	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase terpenuhinya kegiatan penunjang operasional perangkat daerah	Jumlah pemenuhan kebutuhan penerangan dan instalasi listrik penunjang operasional kantor		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Bulan		4,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase terpenuhinya kegiatan penunjang operasional perangkat daerah	100 %	5,300,000
1	04	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase terpenuhinya kegiatan penunjang operasional perangkat daerah	Jumlah ATK yang dibutuhkan Jumlah Materai		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Paket		65,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase terpenuhinya kegiatan penunjang operasional perangkat daerah	100 %	65,000,000
1	04	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase terpenuhinya kegiatan penunjang operasional perangkat daerah	Jumlah penyediaan peralatan rumah tangga dan alat pembersih		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Paket		21,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase terpenuhinya kegiatan penunjang operasional perangkat daerah	100 %	21,000,000

Unit Organisasi : 1.03.2.10.1.04.01.0000 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman  
Sub Unit Organisasi : 1.03.2.10.1.04.01.0000 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kabupaten Pasaman Barat  
Tahun 2021

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	04	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase terpenuhinya kegiatan penunjang operasional perangkat daerah	Jumlah Blanko SPT, SPPD, Kuitansi dan map DPKP yang dibutuhkan		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Paket		27,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase terpenuhinya kegiatan penunjang operasional perangkat daerah	100 %	45,000,000
1	04	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase terpenuhinya kegiatan penunjang operasional perangkat daerah	Jumlah rapat koordinasi dari Pemerintah Provinsi dan Pusat (K/L) yang diikuti		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	10 Kali		90,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase terpenuhinya kegiatan penunjang operasional perangkat daerah	100 %	240,770,800
1	04	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								100,000,000	250,000,000				
1	04	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase terpenuhinya kegiatan penunjang operasional perangkat daerah	Jumlah Pengadaan Peralatan elektronik penunjang operasional kantor dan administrasi perkantoran		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	6 Unit		100,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase terpenuhinya kegiatan penunjang operasional perangkat daerah	100 %	250,000,000
1	04	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								79,100,000	79,100,000				
1	04	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase terpenuhinya kegiatan penunjang operasional perangkat daerah	Frekuensi penyediaan kebutuhan listrik dan air untuk operasional kantor		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Bulan		45,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase terpenuhinya kegiatan penunjang operasional perangkat daerah	100 %	45,000,000
1	04	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase terpenuhinya kegiatan penunjang operasional perangkat daerah	Jumlah Non PNS (THL) yang melaksanakan tugas K3 Jumlah penyediaan Jasa pembersihan kantor		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	2 Orang 1 Unit		34,100,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase terpenuhinya kegiatan penunjang operasional perangkat daerah	100 %	34,100,000
1	04	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								113,500,000	113,500,000				
1	04	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase terpenuhinya kegiatan penunjang operasional perangkat daerah	Jumlah kendaraan dinas yang akan dilakukan pemeliharaan dan pembayaran pajak/KIR		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	24 Unit		75,500,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase terpenuhinya kegiatan penunjang operasional perangkat daerah	100 %	75,500,000
1	04	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase terpenuhinya kegiatan penunjang operasional perangkat daerah	Jumlah alat elektronik penunjang operasional administrasi perkantoran yang dipelihara		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	30 Unit		38,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase terpenuhinya kegiatan penunjang operasional perangkat daerah	100 %	38,000,000
1	04	02			PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN								143,109,238	1,137,000,000				
1	04	02	2.01		Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota								128,109,238	150,000,000				
1	04	02	2.01	01	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan Rumah Layak yang sesuai standar teknis	Jumlah data perumahan di lokasi rawan bencana/relokasi		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50 %	19 Nagari		52,109,238	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase peningkatan Rumah Layak yang sesuai standar teknis	50 %	30,000,000

Unit Organisasi : 1.03.2.10.1.04.01.0000 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman  
Sub Unit Organisasi : 1.03.2.10.1.04.01.0000 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kabupaten Pasaman Barat  
Tahun 2021

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	04	02	2.01	02	Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Persentase peningkatan Rumah Layak yang sesuai standar teknis	Jumlah data lahan potensial untuk lokasi relokasi perumahan		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50 %	19 Nagari		19,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase peningkatan Rumah Layak yang sesuai standar teknis	50 %	30,000,000
1	04	02	2.01	03	Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	Persentase peningkatan Rumah Layak yang sesuai standar teknis	Jumlah data rumah korban bencana yang belum tertangani		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50 %	19 Nagari		19,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase peningkatan Rumah Layak yang sesuai standar teknis	50 %	30,000,000
1	04	02	2.01	04	Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	Persentase peningkatan Rumah Layak yang sesuai standar teknis	Jumlah data Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana Alam		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50 %	19 Nagari		19,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase peningkatan Rumah Layak yang sesuai standar teknis	50 %	30,000,000
1	04	02	2.01	05	Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan Rumah Layak yang sesuai standar teknis	Jumlah data penerima Batuan Rumah yang Terkena Relokasi Program kabupaten		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50 %	19 Nagari		19,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase peningkatan Rumah Layak yang sesuai standar teknis	50 %	30,000,000
1	04	02	2.02		Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota							0				50,000,000		
1	04	02	2.02	01	Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana	Persentase peningkatan Rumah Layak yang sesuai standar teknis	Jumlah peserta Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50 %	200 Orang		0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase peningkatan Rumah Layak yang sesuai standar teknis	50 %	50,000,000
1	04	02	2.03		Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota							0				875,000,000		
1	04	02	2.03	01	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Persentase peningkatan Rumah Layak yang sesuai standar teknis	Jumlah Rehab Rumah Korban Bencana		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50 %	10 Unit		0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase peningkatan Rumah Layak yang sesuai standar teknis	50 %	875,000,000
1	04	02	2.06		Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan							15,000,000				62,000,000		
1	04	02	2.06	01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi secara Elektronik	Persentase peningkatan Rumah Layak yang sesuai standar teknis	Jumlah komitmen penerbitan izin pembangunan dan pengembangan perumahan terintegrasi secara elektronik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50 %	10 Komitmen		0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase peningkatan Rumah Layak yang sesuai standar teknis	50 %	12,000,000
1	04	02	2.06	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Persentase peningkatan Rumah Layak yang sesuai standar teknis	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50 %	10 Kali		15,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase peningkatan Rumah Layak yang sesuai standar teknis	50 %	50,000,000
1	04	03			PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN							4,426,800,000				6,800,000,000		
1	04	03	2.01		Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman							226,800,000				300,000,000		

Unit Organisasi : 1.03.2.10.1.04.01.0000 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman  
Sub Unit Organisasi : 1.03.2.10.1.04.01.0000 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kabupaten Pasaman Barat  
Tahun 2021

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	04	03	2.01	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	Persentase Rumah Tangga bersanitasi layak	Jumlah Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh Terbayarkan Honor THL Bidang Kawasan Permukiman		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	80 %	1 Kawasan 17 Orang		226,800,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Rumah Tangga bersanitasi layak	80 %	300,000,000
1	04	03	2.02		Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha							400,000,000	700,000,000					
1	04	03	2.02	01	Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	Persentase Rumah Tangga bersanitasi layak	Jumlah data lokasi kawasan kumuh sesuai keadaan eksisting di kabupaten pasamaman barat		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	80 %	1 Dokumen		400,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Rumah Tangga bersanitasi layak	80 %	500,000,000
1	04	03	2.02	05	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Persentase Rumah Tangga bersanitasi layak	Jumlah Koordinasi dan Singkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan Permukiman kumuh		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	80 %	25 Kali		0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Rumah Tangga bersanitasi layak	80 %	50,000,000
1	04	03	2.02	08	Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	Persentase Rumah Tangga bersanitasi layak	Jumlah Rumusan Kebijakan Mengenai Perumahan dan Kawasan Permukiman		Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	80 %	1 Dokumen		0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Rumah Tangga bersanitasi layak	80 %	150,000,000
1	04	03	2.03		Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha							3,800,000,000	5,800,000,000					
1	04	03	2.03	01	Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh	Persentase Rumah Tangga bersanitasi layak	Jumlah Site Plan dan DED untuk Pengurangan Persentase Luasan Kawasan Kumuh		Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	80 %	2 Dokumen		50,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Rumah Tangga bersanitasi layak	80 %	300,000,000
1	04	03	2.03	02	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Persentase Rumah Tangga bersanitasi layak	jumlah rumah layak huni yang di perbaiki		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	80 %	75 Unit		1,750,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Fisik-Bidang Jalan-Penugasan-Jalan		Persentase Rumah Tangga bersanitasi layak	80 %	5,000,000,000
1	04	03	2.03	06	Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh	Persentase Rumah Tangga bersanitasi layak	Jumlah kerjasama perbaikan rumah tidak layak huni beserta PSU		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	80 %	6 Lokasi		2,000,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Rumah Tangga bersanitasi layak	80 %	500,000,000
1	04	04			PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH							385,000,000	875,000,000					
1	04	04	2.01		Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota							385,000,000	875,000,000					



Unit Organisasi : 1.03.2.10.1.04.01.0000 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Sub Unit Organisasi : 1.03.2.10.1.04.01.0000 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Kabupaten Pasaman Barat

Tahun 2021

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	04	04	2.01	01	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Persentase ketersediaan rumah layak huni dan kawasan kumuh	Jumlah perbaikan Rumah Tidak Layak Huni diluar Kawasan Kumuh		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	99.26 %	20 Unit		385,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase ketersediaan rumah layak huni dan kawasan kumuh	99.26 %	875,000,000
1	04	05			PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)							50,000,000				1,633,000,000		
1	04	05	2.01		Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan							50,000,000				1,633,000,000		
1	04	05	2.01	01	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Persentase Perumahan memiliki fasislitas PSU yang memadai	Jumlah perencanaan Teknis PSU Perumahan		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	70 %	2 Dokumen		50,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Perumahan memiliki fasislitas PSU yang memadai	70 %	150,000,000
1	04	05	2.01	02	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Persentase Perumahan memiliki fasislitas PSU yang memadai	Jumlah penyediaan PSU di perumahan untuk menunjang fungsi hunian		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	70 %	2 Perumahan		0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Perumahan memiliki fasislitas PSU yang memadai	70 %	1,483,000,000
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
2	10				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN							562,600,000				982,600,000		
2	10	02			PROGRAM PENGELOLAAN IZIN LOKASI							50,000,000				100,000,000		
2	10	02	2.01		Pemberian Izin Lokasi Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota							50,000,000				100,000,000		
2	10	02	2.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Lokasi Penanaman Modal dan Kemudahan Berusaha	Persentase Rekomendasi Pemberian izin lokasi dalam kabupaten	Jumlah koordinasi pemberian izin lokasi berdasarkan aspek penanaman modal dan kemudahan berusaha		Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10 %	60 Kali		50,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Rekomendasi Pemberian izin lokasi dalam kabupaten	10 %	100,000,000
2	10	04			PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN							50,000,000				100,000,000		
2	10	04	2.01		Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota							50,000,000				100,000,000		
2	10	04	2.01	01	Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase konflik pertanahan difasilitasi/	Jumlah peta sengketa, konflik dan perkara pertanahan dalam kabupaten		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	5 Kasus		25,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase konflik pertanahan difasilitasi/	100 %	50,000,000
2	10	04	2.01	02	Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase konflik pertanahan difasilitasi/	Jumlah kasus sengketa tanah garapan dalam kabupaten		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	5 Kasus		25,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase konflik pertanahan difasilitasi/	100 %	50,000,000
2	10	05			PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN							182,600,000				192,600,000		
2	10	05	2.01		Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota							182,600,000				192,600,000		

Unit Organisasi : 1.03.2.10.1.04.01.0000 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman  
Sub Unit Organisasi : 1.03.2.10.1.04.01.0000 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kabupaten Pasaman Barat  
Tahun 2021

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2	10	05	2.01	01	Penetapan Daftar Masyarakat Penerima Santunan Tanah dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase konflik pertanahan difasilitasi / diselesaikan/Persentase terlaksananya proses ganti rugi tanah dan santunan tanah untuk pembangunan oleh pemerintah daerah	Jumlah dokumen penerima ganti rugi santunan tanah dalam kabupaten		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	5 Dokumen		20,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase konflik pertanahan difasilitasi / diselesaikan/Persentase terlaksananya proses ganti rugi tanah dan santunan tanah untuk pembangunan oleh pemerintah daerah	100 %	30,000,000
2	10	05	2.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase konflik pertanahan difasilitasi / diselesaikan/Persentase terlaksananya proses ganti rugi tanah dan santunan tanah untuk pembangunan oleh pemerintah daerah	Jumlah koordinasi masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh pemerintah daerah		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	30 Kali		162,600,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase konflik pertanahan difasilitasi / diselesaikan/Persentase terlaksananya proses ganti rugi tanah dan santunan tanah untuk pembangunan oleh pemerintah daerah	100 %	162,600,000
2	10	06			PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, SERTA GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE								120,000,000	200,000,000				
2	10	06	2.01		Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota								120,000,000	200,000,000				
2	10	06	2.01	01	Inventarisasi Subjek dan Objek Redistribusi Tanah	Persentase Penetapan Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah	Jumlahsubyekdanobyek redistribusi tanah dalam kabupaten		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 %	2 Kelompok		30,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penetapan Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah	2 %	50,000,000
2	10	06	2.01	02	Inventarisasi dan Rekomendasi Objek Redistribusi Tanah	Persentase Penetapan Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah	Jumlah rekomendasi obyek redistribusi tanah		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 %	2 Kelompok		30,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penetapan Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah	2 %	50,000,000
2	10	06	2.01	03	Koordinasi Penyelenggaraan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Persentase Penetapan Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah	Jumlah penyelenggaraan redistribusi tanah obyek reforma agraria dalam kabupaten dengan baik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 %	2 Kelompok		30,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penetapan Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah	2 %	50,000,000
2	10	06	2.01	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Persentase Penetapan Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah	Jumlah koordinasi akses dalam pemanfaatan redistribusi tanah dalam kabupaten		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 %	10 Kali		30,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penetapan Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah	2 %	50,000,000
2	10	07			PROGRAM PENETAPAN TANAH ULAYAT								55,000,000	140,000,000				
2	10	07	2.01		Penetapan Tanah Ulayat yang Lokasinya dalam Daerah Kabupaten/Kota								55,000,000	140,000,000				
2	10	07	2.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Survei dan Pemetaan Batas Tanah Ulayat dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase terpetakannya tanah ulayat dalam kabupaten	Jumlah koordinasi pemetaan batas tanah ulayat dalam kabupaten		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	30 %	12 Kali		25,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase terpetakannya tanah ulayat dalam kabupaten	30 %	40,000,000

Unit Organisasi : 1.03.2.10.1.04.01.0000 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman  
Sub Unit Organisasi : 1.03.2.10.1.04.01.0000 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kabupaten Pasaman Barat  
Tahun 2021

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2	10	07	2.01	03	Penetapan Tanah Ulayat dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku	Persentase terpetakannya tanah ulayat dalam kabupaten	Jumlah penetapan batas tanah ulayat lintas daerah di kabupaten		Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	30 %	6 Lokasi		30,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase terpetakannya tanah ulayat dalam kabupaten	30 %	100,000,000
2	10	08			PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG								30,000,000				100,000,000	
2	10	08	2.02		Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong								30,000,000				100,000,000	
2	10	08	2.02	01	Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong	Persentase tersedianya data inventaris tanah kosong dalam kabupaten	Jumlah data inventaris tanah kosong dalam kabupaten		Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	25 %	1 Dokumen		30,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase tersedianya data inventaris tanah kosong dalam kabupaten	25 %	100,000,000
2	10	09			PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH								50,000,000				90,000,000	
2	10	09	2.01		Penerbitan Izin Membuka Tanah								50,000,000				90,000,000	
2	10	09	2.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Membuka Tanah	Persentase Izin Membuka Tanah	Jumlah koordinasi dan singronisasi pemberian izin pembukaan tanah		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 %	5 Kasus		25,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Izin Membuka Tanah	2 %	50,000,000
2	10	09	2.01	02	Pengendalian Pemanfaatan Tanah Negara	Persentase Izin Membuka Tanah	Jumlah rekomendasi yang di terbitkan		Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 %	25 Dokumen		25,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Izin Membuka Tanah	2 %	40,000,000
2	10	10			PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH								25,000,000				60,000,000	
2	10	10	2.01		Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota								25,000,000				60,000,000	
2	10	10	2.01	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota	Tertlaksanaan koordinasi tentang tanah hamparan Berdasarkan RTRW / RDTR	Jumlah koordinasi pelaksanaan konsolidasi tanah dalam kabupaten		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5 %	60 Kali		25,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Tertlaksanaan koordinasi tentang tanah hamparan Berdasarkan RTRW / RDTR	5 %	60,000,000
TOTAL													16,435,795,285				26,722,350,800	

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Dokumen Rencana Kerja (Renja) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2022 akan digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan pada tahun 2022. Tentu saja, keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan yang termuat dalam Rencana Kerja ini sangat bergantung kepada komitmen dan kerjasama semua pihak yang terkait. Diperlukan upaya koordinasi yang lebih intense antar semua pihak sehingga program dan kegiatan bisa dilaksanakan dengan baik.

Selain itu, diperlukan komitmen semua pihak terkait tindak lanjut dari segala kegiatan yang dilaksanakan. Mengingat tugas pokok dan fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasaman Barat sebagai penyelenggara urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman dan bidang pertanahan memiliki peran dan fungsi strategis dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan, maka tindak lanjut (*follow up*) menjadi suatu keharusan. Dengan demikian, dokumen rencana yang telah disusun tidak hanya sebatas dokumen tanpa implikasi.

Tentu saja, Renja ini membutuhkan umpan balik (*feedback*) yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan perumusan rencana program di masa mendatang. Dengan demikian, program-program pembangunan akan lebih terarah dan bersinergi untuk mendapatkan hasil yang lebih baik di masa mendatang melalui perencanaan yang terintegrasi.

Padang Tujuh, 6 Agustus 2021

  
Kepala Dinas  
**AHDIYARSYAH, ST.MT**  
Pembina Tk. I / IV.b  
NIP. 19770122 200312 1 002

**MATRIKS RENJA TAHUN 2022 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2023**  
**PERANGKAT DAERAH DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**

Kode rekening					Nama program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator program/kegiatan/sub kegiatan	Target kinerja (program/kegiatan/sub kegiatan)	Lokasi	Kebutuhan dana/pagu indikatif	Perkiraan maju rencana tahun 2023	
										Target capaian kinerja	Kebutuhan dana/pagu indikatif
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				16.476.908.853	-	16.287.908.853
1	04				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN				16.476.908.853		16.287.908.853
1	04	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1. Cakupan pelayanan administrasi perkantoran 2. Persentase terpenuhinya sarana dan prasarana aparatur 3. Persentase peningkatan kapasitas aparatur yang profesional	100%	Kab. Pasbar	4.361.908.853	100%	4.512.908.853
1	04	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			Kab. Pasbar	3.400.308.853		3.400.308.853
1	04	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah PNS yang mendapat gaji dan tunjangan	24 Orang PNS	Kab. Pasbar	2.814.758.853	24 Orang PNS	2.814.758.853
1	04	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Non PNS (PTT/THL) penunjang administrasi perkantoran	4 ORANG PTT 21 ORANG THL	Kab. Pasbar	316.650.000	4 ORANG PTT 21 ORANG THL	316.650.000
1	04	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Penyediaan honorarium petugas pengelola keuangan	12 Bulan	Kab. Pasbar	268.900.000	12 Bulan	268.900.000
1	04	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang dikelola DPKP	100%	Kab. Pasbar	75.000.000	100%	75.000.000
1	04	01	2.03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1. Jumlah Peralatan Kantor Yang Dipelihara 2. Honor dan Uang Makan THL Jaga Malam	10 Unit 2 Orang	Kab. Pasbar	45.000.000	30 Unit 2 Orang	45.000.000
1	04	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah ASN / THL Penatausahaan Barang Milik Daerah (Honor Pengurus Barang)	2 Orang	Kab. Pasbar	30.000.000	2 Orang	30.000.000
1	04	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang mengikuti Bimtek	24 Orang	Kab. Pasbar	250.000.000	24 Orang	270.000.000
1	04	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang mengikuti Diklat Prajabatan dan Diklat Kepemimpinan (PIM)	2 Orang	Kab. Pasbar	40.000.000	2 Orang	40.000.000
1	04	01	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah ASN yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	24 Orang	Kab. Pasbar	60.000.000	24 Orang	80.000.000
1	04	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah ASN yang mengikuti Bimtek Peningkatan Kapasitas Pegawai	24 Orang	Kab. Pasbar	150.000.000	24 Orang	150.000.000
1	04	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	1. Persentase pelayanan kebutuhan administrasi perkantoran 2. Jumlah pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor 3. Jumlah rapat-rapat koordinasi dalam dan luar daerah	1. 100% 2. 3 Unit 3. 50 Kali	Kab. Pasbar	247.000.000	1. 100% 2. 3 Unit 3. 50 Kali	288.000.000
1	04	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah pemenuhan kebutuhan penerangan dan instalasi listrik penunjang operasional kantor	12 Bulan	Kab. Pasbar	6.000.000	12 Bulan	7.000.000
1	04	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah ATK yang dibutuhkan Jumlah Materi	1 Paket	Kab. Pasbar	65.000.000	1 Paket	65.000.000

Kode rekening					Nama program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator program/kegiatan/sub kegiatan	Target kinerja (program/kegiatan/sub kegiatan)	Lokasi	Kebutuhan dana/pagu indikatif	Perkiraan maju rencana tahun 2023	
										Target capaian kinerja	Kebutuhan dana/pagu indikatif
1	04	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah penyediaan peralatan rumah tangga dan alat pembersih	1 Paket	Kab. Pasbar	21.000.000	1 Paket	21.000.000
1	04	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Blanko SPT, SPPD, Kuitansi dan map DPKP yang dibutuhkan	1 Paket	Kab. Pasbar	30.000.000	1 Paket	45.000.000
1	04	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah koordinasi keur daerah	50 Kali	Kab. Pasbar	125.000.000	50 Kali	150.000.000
1	04	01	2.07		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Jumlah pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor</b>	<b>2 Unit PC 3 Unit Printer 1 Unit Scanner Portable</b>	<b>Kab. Pasbar</b>	<b>175.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>250.000.000</b>
1	04	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pengadaan peralatan elektronik penunjang operasional kantor dan administrasi perkantoran	5 Unit PC 5 Unit Printer 1 Unit Scanner Portable	Kab. Pasbar	175.000.000		250.000.000
1	04	01	2.08		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Cakupan pemenuhan penyediaan jasa layanan penunjang urusan kantor</b>	<b>100%</b>	<b>Kab. Pasbar</b>	<b>79.100.000</b>	<b>100%</b>	<b>79.100.000</b>
1	04	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Frekuensi penyediaan kebutuhan listrik dan air untuk operasional kantor	12 Bulan	Kab. Pasbar	45.000.000	12 Bulan	45.000.000
1	04	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1. Jumlah penyediaan Jasa pembersihan kantor 2. Jumlah Non PNS (THL) yang melaksanakan tugas K3	1 Unit 2 Orang	Kab. Pasbar Kab. Pasbar	34.100.000	1 Unit 2 Orang	34.100.000
1	04	01	2.09		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah sarana dan prasarana kantor yang dipelihara</b>	<b>54 Unit</b>	<b>Kab. Pasbar</b>	<b>135.500.000</b>	<b>54 Unit</b>	<b>150.500.000</b>
1	04	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas yang akan dilakukan pemeliharaan dan pembayaran pajak/KIR	24 Unit	Kab. Pasbar	75.500.000	24 Unit	75.500.000
1	04	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah alat elektronik penunjang operasional administrasi perkantoran yang dipelihara	30 Unit	Kab. Pasbar	60.000.000	30 Unit	75.000.000
1	04	02			<b><u>PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN</u></b>	<b><u>Persentase peningkatan Rumah Layak yang sesuai standar teknis</u></b>	<b><u>50%</u></b>	<b>Kab. Pasbar</b>	<b><u>2.135.000.000</u></b>	<b><u>70 Persen</u></b>	<b><u>1.825.000.000</u></b>
1	04	02	2.01		<b>Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase tersedianya data rumah korban bencana/ dan rumah yang terkena relokasi program Kabupaten Kota</b>	<b>100%</b>	<b>Kab. Pasbar</b>	<b>460.000.000</b>	<b>100 Persen</b>	<b>150.000.000</b>
1	04	02	2.01	01	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah data perumahan di lokasi rawan bencana/relokasi	19 Nagari	Kab. Pasbar	150.000.000	19 Nagari	30.000.000
1	04	02	2.01	02	Identifikasi Lahan-lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Jumlah data lahan potensial untuk lokasi relokasi perumahan	19 Nagari	Kab. Pasbar	30.000.000	19 Nagari	30.000.000
1	04	02	2.01	03	Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	Jumlah data rumah korban bencana yang belum tertangani	19 Nagari	Kab. Pasbar	45.000.000	19 Nagari	30.000.000
1	04	02	2.01	04	Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	Jumlah data Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana Alam	19 Nagari	Kab. Pasbar	45.000.000	19 Nagari	30.000.000

Kode rekening					Nama program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator program/kegiatan/sub kegiatan	Target kinerja (program/kegiatan/sub kegiatan)	Lokasi	Kebutuhan dana/pagu indikatif	Perkiraan maju rencana tahun 2023	
										Target capaian kinerja	Kebutuhan dana/pagu indikatif
1	04	02	2,01	05	Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah data Penerima Batuan Rumah yang Terkena Relokasi Program kabupaten	19 Nagari	Kab. Pasbar	190.000.000	19 Nagari	30.000.000
1	04	02	2,02		Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Persentase meningkatnya pemahaman masyarakat Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana	50%	Kab. Pasbar	100.000.000	50 Persen	100.000.000
1	04	02	2,02	01	Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana	Jumlah peserta Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana	200 Orang	Kab. Pasbar	100.000.000	200 Orang	100.000.000
1	04	02	2,03		Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Persentase RTLH diluar Kawasan Kumuh	12%	Kab. Pasbar	1.500.000.000	12%	1.500.000.000
1	04	02	2,03	01	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rehab Rumah Korban Bencana	80 Unit	Kab. Pasbar	1.500.000.000	80 Unit	1.500.000.000
1	04	02	2,06		Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Persentase Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	100%	Kab. Pasbar	75.000.000	100 Persen	75.000.000
1	04	02	2,06	01	Facilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah komitmen penerbitan izin pembangunan dan pengembangan perumahan terintegrasi secara elektronik	10 Komitmen	Kab. Pasbar	25.000.000	10 Komitmen	25.000.000
1	04	02	2,06	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	10 Kali	Kab. Pasbar	50.000.000	10 Kali	50.000.000
1	04	03			PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	25%	Kab. Pasbar	4.830.000.000	25%	4.800.000.000
1	04	03	2,01		Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Persentase Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	25%	Kab. Pasbar	330.000.000	25%	300.000.000
1	04	03	2,01	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	Jumlah Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	1 Kawasan	Kab. Pasbar	330.000.000	1 Kawasan 17 Orang	300.000.000
1	04	03	2,02		Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Persentase Meningkatnya Kualitas Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh	10%	Kab. Pasbar	700.000.000	15%	700.000.000
1	04	03	2,02	01	Survei dan Penetapan Lokasi Permukiman Kumuh	Jumlah data lokasi kawasan kumuh sesuai keadaan eksisting di kabupaten pasamaman barat	1 Dokumen	Kab. Pasbar	500.000.000	1 Dokumen	500.000.000
1	04	03	2,02	05	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan Permukiman kumuh	Jumlah Koordinasi dan Singkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan Permukiman kumuh	25 Kali	Kab. Pasbar	50.000.000	25 Kali	50.000.000
1	04	03	2,02	08	Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	Jumlah Rumusan Kebijakan Mengenai Perumahan dan Kawasan Permukiman	1 Dokumen	Kab. Pasbar	150.000.000	1 Dokumen	150.000.000
1	04	03	2,03		Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Persentase Berkurangnya luasan kawasan kumuh	10%	Kab. Pasbar	3.800.000.000	15%	3.800.000.000
1	04	03	2,03	01	Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh	Jumlah Site Plan dan DED untuk Pengurangan Persentase Luasan Kawasan Kumuh	2 Dokumen	Kab. Pasbar	300.000.000	2 Dokumen	300.000.000

Kode rekening					Nama program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator program/kegiatan/sub kegiatan	Target kinerja (program/kegiatan/sub kegiatan)	Lokasi	Kebutuhan dana/pagu indikatif	Perkiraan maju rencana tahun 2023	
										Target capaian kinerja	Kebutuhan dana/pagu indikatif
1	04	03	2,03	02	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah rumah tidak layak huni yang di perbaiki	120 Unit	Kab. Pasbar	3.000.000.000	120 Unit	3.000.000.000
1	04	03	2,03	03	Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU	Jumlah Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU	2 MOU	Kab. Pasbar	500.000.000	2 MOU	500.000.000
1	04	04			<b>PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH</b>	<b>Persentase Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni diluar Kawasan Kumuh</b>	<b>1,20%</b>	Kab. Pasbar	<b>3.000.000.000</b>	<b>2,4%</b>	<b>3.000.000.000</b>
1	04	04	2.01		<b>Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni diluar Kawasan Kumuh</b>	<b>1,20%</b>	<b>Kab. Pasbar</b>	<b>3.000.000.000</b>	<b>2,4%</b>	<b>3.000.000.000</b>
1	04	04	2.01	01	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	jumlah Rumah Tidak Layak Huni diluar Kawasan Kumuh yang diperbaiki	120 Unit	Kab. Pasbar	3.000.000.000	120 Unit	3.000.000.000
1	04	05			<b>PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)</b>	<b>Persentase Perumahan memiliki fasislitas PSU yang memadai</b>	<b>70%</b>	Kab. Pasbar	<b>2.150.000.000</b>	<b>80 Persen</b>	<b>2.150.000.000</b>
1	04	05	2,01		<b>Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan</b>	<b>Persentase Perumahan memiliki fasislitas PSU yang memadai</b>	<b>10%</b>	Kab. Pasbar	<b>2.150.000.000</b>	<b>15 Persen</b>	<b>2.150.000.000</b>
1	04	05	2,01	01	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Jumlah perencanaan Teknis PSU Perumahan	3 Dokumen	Kab. Pasbar	150.000.000	3 Dokumen	150.000.000
1	04	05	2,01	02	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah Penyediaan PSU di perumahan untuk menunjang fungsi hunian	2 Perumahan	Kab. Pasbar	2.000.000.000	2 Perumahan	2.000.000.000
2					<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>				<b>1.002.600.000</b>	<b>-</b>	<b>1.002.600.000</b>
2	10				<b>URUSAS PEMERINTAHAN BIDANG BERTANAHAN</b>				<b>1.002.600.000</b>		<b>1.002.600.000</b>
2	10	02			<b>PROGRAM PENGELOLAAN IZIN LOKASI</b>	<b>Persentase Rekomendasi Pemberian izin lokasi dalam kabupaten</b>	<b>10%</b>	Kab. Pasbar	<b>100.000.000</b>	<b>20 Persen</b>	<b>100.000.000</b>
2	10	02	2.01		<b>Pemberian Izin Lokasi Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah Rekomendasi Pemberian izin lokasi dalam kabupaten</b>	<b>10 Rekomendasi</b>	Kab. Pasbar	<b>100.000.000</b>	<b>10 Rekomendasi</b>	<b>100.000.000</b>
2	10	02	2.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Lokasi dalam Rangka Penanaman Modal dan Kemudahan Berusaha	Jumlah koordinasi pemberian izin lokasi berdasarkan aspek penanaman modal dan kemudahan berusaha	60 Kali	Kab. Pasbar	100.000.000	60 Kali	100.000.000
2	10	04			<b>PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN</b>	<b>Persentase Selesaiannya Konflik pertanahan di Kabupaten</b>	<b>2%</b>	Kab. Pasbar	<b>100.000.000</b>	<b>2 Persen</b>	<b>100.000.000</b>
2	10	04	2.01		<b>Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota.</b>	<b>Persentase Konflik pertanahan yang diselesaikan</b>	<b>100%</b>	Kab. Pasbar	<b>100.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>100.000.000</b>
2	10	04	2.01	01	Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota.	Jumlah peta sengketa, konflik dan perkara pertanahan dalam kabupaten	5 Kasus	Kab. Pasbar	50.000.000	5 Kasus	50.000.000
2	10	04	2.01	02	Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota.	Jumlah kasus yang diselesaikan sengketa tanah garapan dalam kabupaten	5 Kasus	Kab. Pasbar	50.000.000	5 Kasus	50.000.000



Kode rekening						Nama program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator program/kegiatan/sub kegiatan	Target kinerja (program/kegiatan/sub kegiatan)	Lokasi	Kebutuhan dana/pagu indikatif	Perkiraan maju rencana tahun 2023	
											Target capaian kinerja	Kebutuhan dana/pagu indikatif
2	10	05				PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Persentase terlaksananya proses ganti rugi tanah dan santunan tanah untuk pembangunan oleh pemerintah daerah	100%	Kabupaten Pasaman Barat	212.600.000	100 Persen	212.600.000
2	10	05	2.01			Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah proses ganti rugi tanah dan santunan tanah untuk pembangunan oleh pemerintah daerah	5 Lokasi	Kabupaten Pasaman Barat	212.600.000	5 Lokasi	212.600.000
2	10	05	2.01	01		Penetapan Daftar Masyarakat Penerima Santunan Tanah dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen penetapan penerima ganti rugi santunan tanah dalam kabupaten	5 Dokumen	Kabupaten Pasaman Barat	30.000.000	5 Dokumen	30.000.000
2	10	05	2.01	02		Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koordinasi masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh pemerintah daerah	30 kali	Kabupaten Pasaman Barat	182.600.000	5 Lokasi	182.600.000
2	10	06				PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, SERTA GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	Persentase Penetapan Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah	4%	Kab. Pasbar	200.000.000	6 Persen	200.000.000
2	10	06	2.01			Penetapan Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penetapan Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah	4%	Kab. Pasbar	200.000.000	6 Persen	200.000.000
2	10	06	2.01	01		Inventarisasi Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah	Jumlah subyek dan obyek redistribusi tanah dalam kabupaten	2 Kelompok	Kab. Pasbar	50.000.000	2 Kelompok	50.000.000
2	10	06	2.01	02		Inventarisasi dan Rekomendasi Obyek Redistribusi Tanah	Jumlah rekomendasi obyek redistribusi tanah	2 Kelompok	Kab. Pasbar	50.000.000	2 Kelompok	50.000.000
2	10	06	2.01	03		Koordinasi Penyelenggaraan redistribusi Tanah Obyek Reforma agraria dalam 1 (satu) kabupaten/kota	Jumlah penyelenggaraan redistribusi tanah obyek reforma agraria dalam kabupaten dengan baik	2 Kelompok	Kab. Pasbar	50.000.000	2 Kelompok	50.000.000
2	10	06	2.01	04		Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah dalam 1 (satu) Kabupaten/kota	Jumlah koordinasi akses dalam pemanfaatan redistribusi tanah dalam kabupaten	10 kali	Kab. Pasbar	50.000.000	2 Kelompok	50.000.000
2	10	07				PROGRAM PENETAPAN TANAH ULAYAT	Persentase terpetakannya tanah ulayat dalam kabupaten	30%	Kab. Pasbar	140.000.000	30%	140.000.000
2	10	07	2.01			Penetapan Tanah Ulayat yang Lokasinya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penetapan tanah ulayat dalam kabupaten	6 Lokasi	Kab. Pasbar	140.000.000	6 Lokasi	140.000.000
2	10	07	2.01	01		Koordinasi dan Sinkronisasi Survei dan Pemetaan Batas Tanah Ulayat dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah koordinasi pemetaan batas tanah ulayat dalam kabupaten	12 Kali	Kab. Pasbar	40.000.000	6 Kali	40.000.000
2	10	07	2.01	03		Penetapan Tanah Ulayat Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku	Jumlah penetapan batas tanah ulayat lintas daerah di kabupaten	6 Lokasi	Kab. Pasbar	100.000.000	6 Lokasi	100.000.000

Kode rekening	Nama program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator program/kegiatan/sub kegiatan	Target kinerja (program/kegiatan/sub kegiatan)	Lokasi	Kebutuhan dana/pagu indikatif	Perkiraan maju rencana tahun 2023	
						Target capaian kinerja	Kebutuhan dana/pagu indikatif
2 10 08	PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG	Persentase tersedianya data inventaris tanah kosong dalam kabupaten	25%	Kab. Pasbar	100.000.000	25 Persen	100.000.000
2 10 08 2.02	Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong	Persentase tersedianya data inventaris tanah kosong dalam kabupaten	100%	Kab. Pasbar	100.000.000	100 Persen	100.000.000
2 10 08 2.02 01	Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong	Jumlah data inventaris tanah kosong dalam kabupaten	1 Dokumen	Kab. Pasbar	100.000.000	1 Dokumen	100.000.000
2 10 09	PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH	Persentase Izin Membuka Tanah	2%	Kab. Pasbar	90.000.000	2 Persen	90.000.000
2 10 09 2.01	Penerbitan Izin Membuka Tanah	Jumlah izin membuka tanah yang diterbitkan	5 izin	Kab. Pasbar	90.000.000	5 Kasus	90.000.000
2 10 09 2.01 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Membuka Tanah	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemberian izin pembukaan tanah	10 kali	Kab. Pasbar	50.000.000	5 Kasus	50.000.000
2 10 09 2.01 02	Pengendalian Pemanfaatan Tanah Negara	Jumlah rekomendasi yang di terbitkan	25 Dokumen	Kab. Pasbar	40.000.000	25 Dokumen	40.000.000
2 10 10	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Terlaksananya koordinasi tentang tanah hamparan Berdasarkan RTRW / RDTR	5%	Kab. Pasbar	60.000.000	10 Persen	60.000.000
2 10 10 2.01	Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penggunaan tanah hamparan dalam satu daerah Berdasarkan RTRW / RDTR	50%	Kab. Pasbar	60.000.000	70%	60.000.000
2 10 10 2.01 03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota	Jumlah koordinasi pelaksanaan konsolidasi tanah dalam kabupaten	60 kali	Kab. Pasbar	60.000.000	60 kali	60.000.000
T o t a l					17.479.508.853		17.290.508.853

Padang Tujuh, Maret 2021  
a.n. Kepala Dinas  
Sekretaris

WINARDI, S.Pi  
NIP. 19810905 200501 1 007